

**ANALISIS KOMPARATIF STRUKTUR SOSIAL EKONOMI
TERHADAP KASUS KEJADIAN KRIMINALITAS PROPERTI
DI PULAU JAWA DAN SUMATERA TAHUN 2015-2024**

(Skripsi)

Oleh

**WINA RISTI HAFIPAH
2211021124**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS KOMPARATIF STRUKTUR SOSIAL EKONOMI TERHADAP KASUS KEJADIAN KRIMINALITAS PROPERTI DI PULAU JAWA DAN SUMATERA TAHUN 2015-2024

Oleh

WINA RISTI HAFIPAH

Perubahan struktur sosial ekonomi Indonesia serta kemajuan teknologi menuntut individu untuk beradaptasi dengan cepat. Seiring proses perkembangan, terdapat persaingan antar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan gaya hidup yang kompleks. Namun, banyak individu memilih cara tidak legal untuk mencapainya yang tercermin dari masih tingginya kasus kriminalitas properti di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera. Studi ini meneliti pengaruh ketimpangan pendapatan, pengangguran, kepadatan penduduk, migrasi masuk antarprovinsi terhadap kriminalitas properti serta apakah migrasi masuk memoderasi pengaruh pengangguran terhadap kasus kejadian kriminalitas properti di dua wilayah berbeda yaitu Pulau Jawa dan Sumatera tahun 2015-2024. Perbedaan kondisi sosial ekonomi dua wilayah tersebut dapat mengindikasikan adanya perbedaan hasil. Dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), hasil penelitian menunjukkan ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas properti di Pulau Jawa maupun Sumatera. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap kriminalitas properti di kedua wilayah. Kepadatan penduduk tidak berpengaruh signifikan di Pulau Jawa, namun berpengaruh positif signifikan di Pulau Sumatera. Selanjutnya, migrasi masuk antarprovinsi tidak berpengaruh signifikan di kedua wilayah. Adapun pengaruh positif pengangguran terhadap kriminalitas properti cenderung melemah ketika migrasi masuk lebih tinggi. Temuan ini menunjukkan perbedaan karakteristik sosial ekonomi wilayah memengaruhi pola kriminalitas properti di Indonesia.

Kata Kunci: Kriminalitas Properti, Sosial Ekonomi, Analisis Komparatif

ABSTRACT

COMPARATIVE ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE ON PROPERTY CRIME CASES IN JAVA AND SUMATERA ISLANDS, 2015-2024

By

WINA RISTI HAFIPAH

Indonesia's socio-economic transformation and technological advancement require individuals to adapt rapidly. Along with these developments, increasing competition among communities to fulfill complex needs and lifestyles has emerged. However, some individuals choose illegal means to achieve these goals, as reflected in the persistently high incidence of property crime in Indonesia, particularly on Java and Sumatra Islands. This study examines the effects of income inequality, unemployment, population density, and interprovincial in-migration on property crime, as well as whether in-migration moderates the effect of unemployment on property crime in two different regions, namely Java and Sumatra, during the period 2015–2024. Differences in the socio-economic conditions of these regions may indicate variations in the determinants of crime. Using the Fixed Effect Model (FEM), the results reveal that income inequality has no significant effect on property crime in either Java or Sumatra. The open unemployment rate has a positive and significant effect on property crime in both regions. Population density has no significant effect in Java but exerts a positive and significant effect in Sumatra. Furthermore, interprovincial in-migration has no significant effect on property crime in either region. The findings also indicate that the positive effect of unemployment on property crime tends to weaken as the level of in-migration increases. These results suggest that regional socio-economic characteristics play an important role in shaping property crime patterns in Indonesia.

Key Words: Property Crime, Socio-economic, Comparative Analysis

**ANALISIS KOMPARATIF STRUKTUR SOSIAL EKONOMI
TERHADAP KASUS KEJADIAN KRIMINALITAS PROPERTI
DI PULAU JAWA DAN SUMATERA TAHUN 2015-2024**

Oleh

WINA RISTI HAFIPAH

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: ANALISIS KOMPARATIF STRUKTUR
SOSIAL EKONOMI TERHADAP KASUS
KEJADIAN KRIMINALITAS PROPERTI DI
PULAU JAWA DAN SUMATERA TAHUN
2015-2024**

Nama Mahasiswa

: Wina Risti Hafipah

Nomor Induk Mahasiswa

: 2211021124

Program Studi

: Ekonomi Pembangunan

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing I

Komisi Pembimbing II

Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.

Vitriyani Tri Purwaningsih, S.Si., M.Sc.

NIP. 197702122006041001

NIP. 199402182022032006

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M.

NIP. 198007052006042002

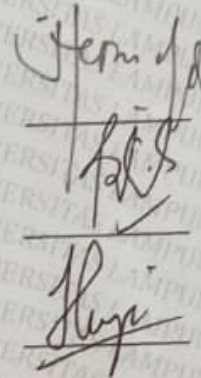
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.**

Penguji I : **Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M.**

Penguji II : **Vitriyani Tri Purwaningsih, S.Si., M.Sc.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **06 Mei 2026**



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wina Risti Hafipah
NPM : 2211021124

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri yang disusun dengan sungguh-sungguh dan bukan penjiplakan karya pihak lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Juni 2026

Penulis



Wina Risti Hafipah

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Wina Risti Hafipah, lahir di Pandeglang pada 16 Januari 2004. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Syarip dan Ibu Juhaenah. Penulis menempuh pendidikan pertama di Taman Kanak-kanak Aisyiyah 1 Baturaja dan lulus pada tahun 2010. Kemudian, melanjutkan pendidikan dasar di SDN 02 Ogan Komering Ulu (OKU) pada tahun 2010-2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 01 OKU pada tahun 2016-2019. Setelah itu, menempuh pendidikan menengah atas di SMAN 04 OKU pada tahun 2019-2022. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung tepatnya pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Pada masa kuliah, penulis aktif mengikuti organisasi di dalam kampus yaitu di Unit Kegiatan Penerbitan Mahasiswa Pilar Ekonomi atau UKPM-F Pilar Ekonomi FEB Unila dan berkesempatan menjadi Pimpinan Usaha UKPM-F Pilar Ekonomi FEB Unila Periode 2024. Penulis juga pernah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah pada Januari 2025. Selain itu, penulis juga berkesempatan mengikuti kegiatan Magang Mandiri di Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan ditempatkan di divisi Neraca Regional dan Pembangunan Daerah pada Januari 2026.

MOTTO

“Dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”

(Q.S Al-Hajj: 78)

“Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu wahai Tuhanku”

(Q.S. Maryam: 4)

“Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan”

(Ali bin Abi Thalib)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”

(B.J. Habibie)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan hasil karya tulis ini kepada

Kedua Orang Tua Penulis,

Bapak Syarip dan Ibu Juhaenah

Terima kasih telah menjadi sosok luar biasa, panutan dan cahaya hidup bagi penulis. Terima kasih untuk setiap doa, kasih sayang, restu, perjuangan dan pengorbanan yang tiada hentinya. Semoga Allah Swt. selalu melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan kepada kalian.

Kemudian, teruntuk kedua saudariku terkasih

Terima kasih sudah hadir dan mencurahkan kasih sayang serta kebahagiaan dalam hidup penulis. Terima kasih untuk setiap doa dan dukungan kepada penulis.

Serta,

Almamater Tercinta

**Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Lampung**

Terima kasih atas kesempatan, ilmu, motivasi dan pengalaman yang diberikan selama masa perkuliahan. Semoga karya ini bisa menjadi sumbangsih kecil dari penulis dan semoga karya ini dapat memberikan manfaat.

SANWACANA

Puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Komparatif Struktur Sosial Ekonomi Terhadap Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2015-2024” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, arahan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih Yulihar Taher, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus selaku dosen pembahas dan penguji penulis. Terima kasih atas arahan, masukan, kritik dan saran yang membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis sejak awal perkuliahan. Terima kasih telah mendampingi penulis selama perjalanan perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing pertama penulis. Terima kasih atas waktu, arahan, kesabaran, motivasi dan dukungan yang luar biasa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Vitriyani Tri Purwaningsih, S.Si., M.Sc. selaku dosen pembimbing kedua penulis. Terima kasih atas waktu, arahan, kesabaran, motivasi dan dukungan yang luar biasa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Prayudha Ananta, S.E., M.Si. selaku dosen pembahas penulis. Terima kasih atas arahan, masukan, kritik dan saran yang membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, wawasan serta telah membantu kelancaran selama perkuliahan.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Syarip dan Ibu Juhaenah. Terima kasih atas restu, kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk meraih mimpi-mimpi. Terima kasih untuk setiap lantunan doa dan tetesan keringat perjuangan yang tiada henti dalam memberikan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik kepada penulis. Maaf untuk segala hal yang belum bisa penulis wujudkan untuk kalian. Semoga kalian diberkahi umur yang panjang dan sehat dan semoga penulis memiliki lebih banyak kesempatan untuk membanggakan dan membahagiakan kalian.
9. Kedua saudariku tersayang, Tete Risti Nuratiah dan adikku Syahira Risti Mareta. Terima kasih untuk dukungan dan kasih sayang yang telah kalian berikan, serta terima kasih telah menjadi penyemangat bagi penulis. Sebagai anak tengah, penulis meminta maaf karena masih menjadi adik yang merepotkan dan belum bisa menjadi sosok tete yang selalu ada. Harapan penulis, di manapun masing-masing langkah kalian berpijak, kabar baik senantiasa mengiringi hari-hari kalian.
10. Sahabat seperjuangan sekaligus keluarga penulis di tanah rantau, Umi, Widia dan Dhea. Terima kasih sudah menjadi saksi perjuangan penulis selama perjalanan perkuliahan ini. Terima kasih untuk setiap bantuan yang pernah diberikan. Terima kasih telah menjadi sahabat yang tidak pernah menganggap penulis sebagai saingannya, melainkan selalu mengajak untuk tumbuh bersama-sama. Terima kasih telah menjadi tempat bertanya, tempat berbagi keluh kesah dan sumber canda tawa serta kebahagiaan selama kuliah. Tidak terasa, kini waktu telah membawa kita sampai pada akhir masa perkuliahan. Selamat menempuh perjalanan berikutnya, semoga kalian selalu menemukan kebahagiaan dan kesuksesan dalam perjalanan hidup kalian selanjutnya.

11. Sahabat sekaligus saudara penulis selama menjadi anak kos, Zahra Amelia. Terima kasih atas kebersamaan yang telah diluangkan dari awal hingga akhir perkuliahan. Terima kasih telah bersedia memberikan bantuan, menemani hari-hari penulis, mendengarkan setiap cerita dan memberikan semangat kepada penulis. Semoga kesuksesan dan hal baik selalu menyertai langkahmu.
12. Sahabat penulis sejak bangku sekolah hingga perkuliahan, Wulan Putri dan Anika. Terima kasih atas bantuan, kebersamaan dan perjuangan yang pernah dilakukan bersama. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang pernah kalian berikan. Semoga segala mimpi dan harapan kalian dapat terwujud.
13. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan tahun 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi bagian cerita indah dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas kekompakan, perjuangan dan kehangatan yang telah dilalui bersama. Selamat menempuh perjalanan selanjutnya, semoga kalian menemukan titik keberhasilan masing-masing atas perjuangan yang pernah kita lalui bersama.
14. Rekan-rekan UKPM-F Pilar Ekonomi FEB Unila tahun 2022-2024. Terima kasih atas kebersamaan, kehangatan, pembelajaran, pengalaman dan kesan baik yang pernah dilakukan bersama. Serta, terkhusus untuk para Presidium Pilar 2024, terima kasih atas kesempatan dan pengalamannya serta terima kasih telah menjalin kerja sama yang baik. Semoga Pilar dan orang-orang yang ada di dalamnya sukses selalu.
15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN), Dhimas, Nyoman, Hanisa, Sania, Sesa dan Mutia. Terima kasih atas kehangatan dan rasa kekeluargaan yang tercipta dalam menjalankan salah satu kewajiban kuliah. Terima kasih telah menjadi tim yang baik, sehingga pekerjaan yang tadinya terasa berat menjadi ringan dilakukan bersama kalian.
16. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih untuk dukungan yang pernah diberikan kepada penulis.
17. Semua orang baik yang pernah terlibat dalam proses kelancaran perkuliahan penulis. Terima kasih untuk setiap bantuan besar maupun kecil, serta secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah Swt. melimpahkan keberkahan kepada kalian.

18. Almamater kebanggaan, Universitas Lampung, terima kasih atas pengalaman dan kesempatan yang telah diberikan dalam membentuk perjalanan penulis di masa depan.

19. Nama yang tertulis di halaman sampul skripsi ini. Terima kasih sudah bertahan sampai titik ini. Dalam perjuangan yang telah dilalui, selalu ada rintangan yang terkadang membuat penulis ingin menyerah. Tapi, dari banyaknya rintangan, selalu ada alasan yang membuat penulis bangkit kembali. Dalam dekapan doa, penulis yakin bahwa selalu ada kemudahan setelah kesulitan dan penulis yakin bahwa keberhasilan adalah milik mereka yang mau berjuang. Untuk insan pemilik nama Wina Risti Hafipah, tetaplah menjadi jiwa yang penuh ambisi dan rendah hati untuk masa-masa yang akan kau lalui selanjutnya.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, penulis berharap skripsi ini tetap dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi para pembaca. Semoga segala dukungan, bimbingan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan oleh Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, April 2026

Penulis

Wina Risti Hafipah

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian.....	16
1.4. Manfaat Penulisan	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Landasan Teori	18
2.1.1. Teori Ekonomi Kriminalitas.....	18
2.1.2. Teori Ketegangan / <i>Strain</i>	19
2.1.3. Teori Kependudukan Malthus	20
2.1.4. Teori Migrasi Harris-Todaro	21
2.1.5. Kriminalitas dan Kriminalitas Properti	22
2.1.6. Ketimpangan Pendapatan.....	24
2.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	27
2.1.8. Kepadatan Penduduk	29
2.1.9. Migrasi Masuk Antarprovinsi	30
2.1.10. Hubungan Antar-Variabel	32
2.2. Tinjauan Empiris	34
2.3. Kerangka Pemikiran	40
2.4. Hipotesis Penelitian.....	43

III. METODOLOGI PENELITIAN.....	44
3.1. Jenis Data dan Ruang Lingkup Penelitian.....	44
3.2. Definisi Operasional Variabel.....	44
3.2.1. Variabel Dependen (Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti)	
.....	44
3.2.2. Variabel Independen.....	45
3.3. Metode Analisis.....	46
3.3.1. Model Penelitian.....	46
3.4. Teknik Analisis Data.....	48
3.4.1. Metode Regresi Data Panel.....	48
3.4.2. Pemilihan Metode Regresi Data Panel.....	49
3.4.3. Uji Asumsi Klasik.....	50
3.4.4. Pengujian Hipotesis.....	52
3.4.5. Analisis Komparatif.....	54
3.4.6. Koefisien Determinasi (R^2).....	56
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1. Statistik Deskriptif.....	57
4.1.1. Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti.....	58
4.1.2. Ketimpangan Pendapatan.....	58
4.1.3. Tingkat Pengangguran.....	59
4.1.4. Kepadatan Penduduk.....	59
4.1.5. Migrasi Masuk Antarprovinsi.....	60
4.2. Uji Pemilihan Model.....	61
4.2.1. Uji <i>Chow</i>	61
4.2.2. Uji Hausman.....	62
4.3. Uji Asumsi Klasik.....	63
4.3.1. Uji Normalitas.....	64
4.3.2. Uji Multikolinearitas.....	65
4.3.3. Uji Heteroskedastisitas.....	66
4.3.4. Uji Autokorelasi.....	67
4.4. Hasil Estimasi.....	68
4.5. Uji Hipotesis.....	72

4.5.1. Uji t	72
4.5.2. Uji F	75
4.6. Analisis Komparatif	76
4.7. Koefisien Determinasi (R^2)	78
4.8. Pembahasan	80
4.8.1. Ketimpangan Pendapatan terhadap Kasus Kejadian Kriminalitas Properti	80
4.8.2. Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kasus Kejadian Kriminalitas Properti	81
4.8.3. Kepadatan Penduduk terhadap Kasus Kejadian Kriminalitas Properti	82
4.8.4. Migrasi Masuk Antarprovinsi terhadap Kasus Kejadian Kriminalitas Properti	84
4.8.5. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kasus Kejadian Kriminalitas Properti yang Dimoderasi oleh Migrasi Masuk Antarprovinsi	86
4.9. Individual Effects	89
V. KESIMPULAN DAN SARAN	92
5.1. Kesimpulan	92
5.2. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Peringkat Kriminalitas Negara-Negara di ASEAN.....	2
Tabel 2. Klasifikasi Kriminalitas	2
Tabel 3. Kepadatan Penduduk Per Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera 2024.....	9
Tabel 4. Tinjauan Empiris	34
Tabel 5. Variabel dan Sumber Data.....	44
Tabel 6. Hasil Uji Statistik Deskriptif Pulau Jawa dan Sumatera	57
Tabel 7. Hasil Uji Chow Pulau Jawa.....	61
Tabel 8. Hasil Uji Chow Pulau Sumatera	62
Tabel 9. Hasil Uji Hausman Pulau Jawa	62
Tabel 10. Hasil Uji Hausman Pulau Sumatera.....	63
Tabel 11. Hasil Uji Multikolinearitas Pulau Jawa.....	65
Tabel 12. Hasil Uji Multikolinearitas Pulau Sumatera	65
Tabel 13. Hasil Uji Heteroskedastisitas Pulau Jawa	66
Tabel 14. Hasil Uji Heteroskedastisitas Pulau Sumatera	66
Tabel 15. Hasil Uji Autokorelasi Pulau Jawa.....	67
Tabel 16. Hasil Uji Autokorelasi Pulau Sumatera.....	68
Tabel 17. Hasil Uji Estimasi Pulau Jawa	68
Tabel 18. Hasil Uji Estimasi Pulau Sumatera	70
Tabel 19. Hasil Uji t Pulau Jawa	72
Tabel 20. Hasil Uji F Pulau Jawa.....	75
Tabel 21. Hasil Uji F Pulau Sumatera.....	75
Tabel 22. Hasil Analisis Komparatif Pulau Jawa dan Sumatera	76
Tabel 23. Hasil Koefisien Determinasi (R^2) Pulau Jawa	79
Tabel 24. Hasil Koefisien Determinasi (R^2) Pulau Sumatera	79

Tabel 25. Individual Effect Pulau Jawa.....	89
Tabel 26. Individual Effect Pulau Sumatera	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Rata-rata Kasus Kejadian Kriminalitas Properti per Pulau di Indonesia Tahun 2015-2024	4
Gambar 2. Rata-rata Rasio Gini per Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2015-2024	6
Gambar 3. Rata-rata Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka per Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2015-2024	8
Gambar 4. Rata-Rata Jumlah Penduduk yang Melakukan Pindah Masuk Antarprovinsi (Migrasi Masuk Internal) di Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2015-2024	12
Gambar 5. Kurva Lorenz	24
Gambar 6. Tingkat Ketimpangan Relatif Kurva Lorenz.....	25
Gambar 7. Empat Kemungkinan Kurva Lorenz	26
Gambar 8. Kerangka Pemikiran.....	42
Gambar 9. Hasil Uji Normalitas Pulau Jawa	64
Gambar 10. Hasil Uji Normalitas Pulau Sumatera	64

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Data Asli Variabel Bebas dan Terikat Pulau Jawa	105
Lampiran 2. Data Asli Variabel Bebas dan Terikat Pulau Sumatera	106
Lampiran 3. Data Variabel Bebas dan Terikat Pulau Jawa Setelah Transformasi	109
Lampiran 4. Data Variabel Bebas dan Terikat Pulau Sumatera Setelah Transformasi	110
Lampiran 5. Hasil Analisis Deskriptif Pulau Jawa	113
Lampiran 6. Hasil Analisis Deskriptif Pulau Sumatera	113
Lampiran 7. Uji Chow Pulau Jawa	113
Lampiran 8. Uji Chow Pulau Sumatera	113
Lampiran 9. Uji Hausman Pulau Jawa	114
Lampiran 10. Uji Hausman Pulau Sumatera.....	114
Lampiran 11. Uji Normalitas Pulau Jawa	114
Lampiran 12. Uji Normalitas Pulau Sumatera	114
Lampiran 13. Uji Multikolinearitas Pulau Jawa	115
Lampiran 14. Uji Multikolinearitas Pulau Sumatera	115
Lampiran 15. Uji Heteroskedastisitas Pulau Jawa	115
Lampiran 16. Uji Heteroskedastisitas Pulau Sumatera	116
Lampiran 17. Uji Autokorelasi Pulau Jawa	116
Lampiran 18. Uji Autokorelasi Pulau Sumatera	116
Lampiran 19. Hasil Estimasi Pulau Jawa.....	117
Lampiran 20. Hasil Estimasi Pulau Sumatera.....	117
Lampiran 21. Uji t Pulau Jawa.....	118

Lampiran 22. Uji t Pulau Sumatera.....	118
Lampiran 23. Uji F Pulau Jawa	118
Lampiran 24. Uji F Pulau Sumatera	118
Lampiran 25. Individual Effect Pulau Jawa.....	118
Lampiran 26. Individual Effect Pulau Sumatera.....	118

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam dua dekade terakhir, struktur sosial ekonomi Indonesia secara nasional mengalami pergeseran dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa. Transformasi ini memengaruhi peningkatan produktivitas di sektor tertentu. Faktor-faktor utama yang mendorong perubahan struktur ekonomi Indonesia meliputi kemajuan teknologi, akumulasi modal, pertumbuhan populasi, serta kebijakan pemerintah (Hasna Tazkiya dkk., 2025). Perkembangan industrialisasi yang diiringi dengan kemajuan teknologi informasi menuntut individu untuk mampu beradaptasi dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya (Anggrayni, 2022). Seiring dengan proses perkembangan, terdapat persaingan yang sangat ketat di antara masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi serta dalam mengejar materialistik dan hedonistik. Kondisi ini semakin diperparah oleh kompleksitas kehidupan modern yang menuntut masyarakat untuk terus beradaptasi dengan cepat (Susanti dkk., 2025). Dampaknya, banyak individu yang mengejar cara tidak legal dengan dalih memenuhi kebutuhan serta gaya hidup mereka dengan cara melakukan tindak kriminal (Anggrayni, 2022).

Kriminalitas merupakan tindakan melanggar hukum, norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Kriminalitas dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi suatu wilayah karena menyebabkan pengalihan sumber daya dari kegiatan produktif yang dapat menciptakan nilai tambah ke kegiatan yang tidak produktif yaitu penanggulangan kejahatan. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik dan investor terhadap stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, kriminalitas menjadi salah satu indikator penting dalam menilai daya saing dan kesejahteraan ekonomi nasional (Kurniasih dkk., 2024).

Global Organized Crime Index, sebuah jaringan ahli independen yang berfokus pada penanganan kejahatan yang dirilis oleh *Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC)* dengan mencakup 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan pada 2023-2025, Indonesia berada di posisi 24 dari 193 negara peringkat keparahan kriminalitas. Sedangkan, posisi di ASEAN, Indonesia berada di peringkat ketiga. Berikut ini adalah peringkat kriminalitas negara-negara di ASEAN menurut laporan *Global Organized (2025)*.

Tabel 1. Peringkat Kriminalitas Negara-Negara di ASEAN

Nama Negara	Skor (0-10)	Peringkat Dunia
Myanmar	8,08	1
Kamboja	7,02	17
Indonesia	6,85	24
Vietnam	6,58	32
Filipina	6,57	33
Malaysia	6,53	35
Laos	6,37	39
Thailand	6,37	40
Timor Leste	3,98	155
Singapura	3,72	163
Brunei Darussalam	2,90	176

Sumber: *Global Initiative, data diolah 2025*.

Berdasarkan data tersebut, tercermin bahwa angka kriminalitas di Indonesia masih dalam kategori yang tidak baik. Oleh karena itu, Indonesia masih memiliki tugas besar dalam menangani tindak kriminalitas demi menciptakan stabilitas, meningkatkan kepercayaan publik serta turut mendukung keberlanjutan ekonomi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, kriminalitas di Indonesia dibagi dalam beberapa klasifikasi yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. Klasifikasi Kriminalitas

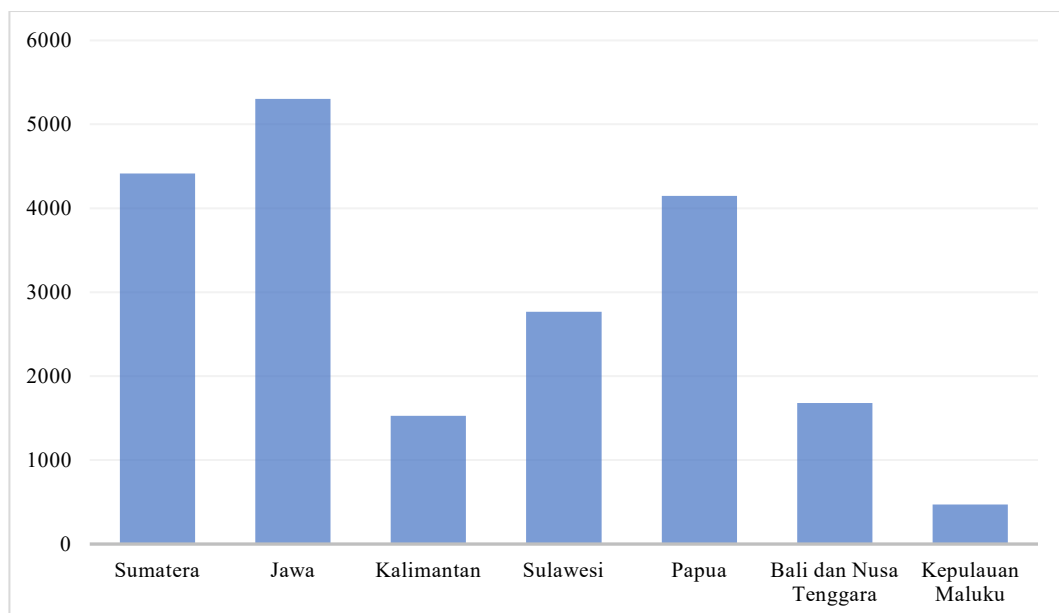
Klasifikasi Kriminalitas	Jenis Tindakan	2024
Kejahatan Terhadap Nyawa	1. Pembunuhan	1.106
	2. Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Mati	563
	Jumlah	1.669
Kejahatan Terhadap Fisik	1. Penganiayaan	48.622
	2. Kekerasan dalam Rumah Tangga	11.524
	3. Pengeroyokan	17.078
	4. Pengancaman	4.655
	5. Penculikan	162
	6. Kejahatan Perdagangan Manusia	692
	7. Pemerasan	1.309

Klasifikasi Kriminalitas	Jenis Tindakan	2024
	8. Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Luka	192
	9. Penghinaan	1.086
	Jumlah	85.320
Kejahatan Terhadap Kesusilaan	1. Perkosaan	1.029
	2. Pencabulan	2.004
	3. Kekerasan Seksual	1.861
	4. Persetubuhan Terhadap Anak	4.525
	Jumlah	9.419
Kejahatan Terhadap Hak Milik	1. Pencurian dengan Kekerasan	5.769
	2. Pencurian Biasa	45.101
	3. Pencurian dengan Pemberatan	51.969
	4. Pencurian Kendaraan Bermotor	18.886
	5. Pengrusakan/Penghancuran Barang	4.974
	6. Pembakaran dengan Sengaja	663
	Jumlah	127.362
Kejahatan Terkait Narkotika dan Obat-Obatan	1. Narkotika dan Psikotropika	44.295
	2. Menjual atau Mengedarkan Obat Keras/Bebas Terbatas Tanpa Izin	2.448
	Jumlah	46.743
Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi	1. Penipuan/Perbuatan Curang	41.356
	2. Penggelapan	27.885
	3. Korupsi	512
	4. Penadahan	288
	Jumlah	70.041
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum	1. Kejahatan terhadap Ketertiban Umum	1.433
	Jumlah	1.433
Kejahatan Terhadap Keamanan Publik dan Negara	1. Membahayakan Keamanan Umum	332
	2. Penyalahgunaan Sajam, Senpi dan Handak	4,202
	3. Kecelakaan Lalu Lintas	152.856
	Jumlah	157.390
Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup	1. Kejahatan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	446
	3. Kejahatan Perkebunan	1.459
	4. Kejahatan Perikanan	199
	5. Kejahatan Pertambangan Mineral dan Batubara	796
	6. Kejahatan Minyak dan Gas	1.249
	Jumlah	4.149

Sumber: Statistik Kriminal 2024-2025.

Dari data di atas, terlihat bahwa kasus kriminalitas tertinggi terdapat pada jenis kejahatan terhadap keamanan publik dan negara yang didominasi oleh tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Kemudian jenis kejahatan dengan jumlah kasus terbesar kedua adalah kejahatan terhadap hak milik atau kriminalitas properti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), properti diartikan sebagai harta berupa tanah, bangunan, sarana dan prasarana yang tidak terpisahkan dari kepemilikan berwujud maupun tidak berwujud. Sehingga, kriminalitas properti ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kriminalitas hak/milik

(Anggrayni, 2022; Shahid *et al.*, 2024; Ahmad *et al.*, 2024). Kriminalitas properti terdiri dari kejahatan hak/milik baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan, sebagaimana dalam pasal 479 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (2023) bahwa kekerasan dalam kriminalitas kepemilikan adalah cara untuk mempermudah supaya kepemilikan barang/properti tetap ditangannya. Kriminalitas properti pada umumnya berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tekanan ekonomi yang muncul akibat kebutuhan dan gaya hidup dan terbatasnya sumber daya ilegal dapat mendorong individu untuk melakukan kriminalitas properti (Anggrayni, 2022; Ozlem, 2022; Shahid *et al.*, 2024).



Sumber: Publikasi Statistik Kriminal Badan Pusat Statistik, data diolah (2026).

Gambar 1. Rata-rata Kasus Kejadian Kriminalitas Properti per Pulau di Indonesia Tahun 2015-2024

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata kasus kejadian kriminalitas properti di Indonesia tidak merata antarwilayah. Pulau Jawa tercatat sebagai wilayah dengan rata-rata kasus kriminalitas properti tertinggi selama periode 2015–2024, yaitu sebesar 5.301 kasus, diikuti Pulau Sumatera sebesar 4.414 kasus, Papua sebesar 4.148 kasus, Sulawesi sebesar 2.767 kasus, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 1.679 kasus, Kalimantan sebesar 1.526 kasus, serta Kepulauan Maluku sebesar 473 kasus. Tingginya rata-rata kasus kriminalitas

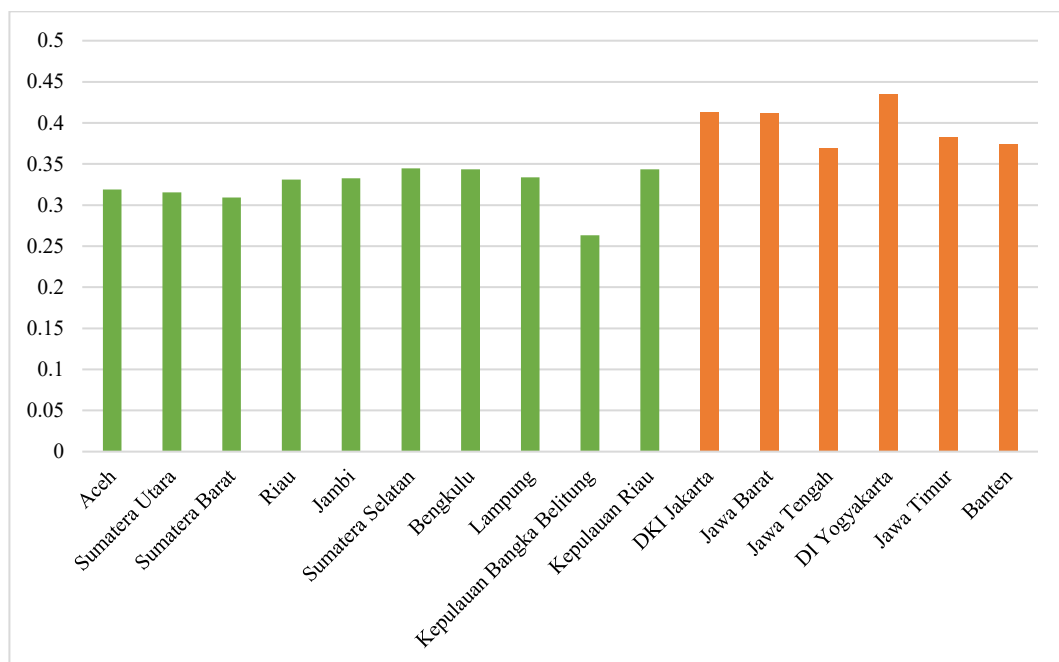
properti di Pulau Jawa dan Sumatera menunjukkan bahwa kedua wilayah tersebut memiliki tingkat kerawanan kriminalitas yang relatif lebih tinggi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan tingginya kasus kriminalitas properti di dua pulau dengan kasus kejadian kriminalitas properti tinggi tersebut.

Meskipun di awal disebutkan bahwa Indonesia sedang mengalami transformasi ekonomi ke sektor jasa dan industri, namun konsentrasi ekonomi nasional dan industrialisasi masih terpusat di Pulau Jawa. Sehingga, menunjukkan bahwa proses perubahan struktur ekonomi tidak berlangsung secara merata antarwilayah (Rinardi dkk., 2023). Di Pulau Jawa, percepatan proses industrialisasi struktur ekonomi telah bergeser ke arah dominasi sektor industri dan jasa yang lebih modern. Perubahan ini mencerminkan tahapan transformasi ekonomi yang lebih maju, ditandai dengan meningkatnya peran aktivitas manufaktur, perdagangan, dan jasa dalam perekonomian regional (Siboro, 2023). Sementara itu, di Pulau Sumatera, struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan, meskipun mulai terjadi pergeseran secara bertahap menuju sektor sekunder dan tersier (Barika dkk., 2021). Perbedaan ini menunjukkan struktur ekonomi di kedua wilayah berlangsung pada tahapan yang tidak sama, sehingga membentuk karakteristik regional yang berbeda (Saputra & Rambe, 2025). Perbedaan struktur ekonomi tersebut berimplikasi pada munculnya tekanan sosial-ekonomi yang berbeda di masing-masing wilayah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi munculnya perilaku ekonomi tertentu, termasuk kecenderungan yang berbeda dalam melakukan tindakan menyimpang kriminalitas properti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, dilakukan analisis komparatif untuk mengetahui faktor sosial ekonomi apa saja yang menjadi determinan kriminalitas properti di Pulau Jawa dan Sumatera dan mengidentifikasi apakah ada perbedaan hasil untuk kedua wilayah tersebut.

Ozlem (2022) menyoroti ketimpangan pendapatan sebagai faktor yang memengaruhi kriminalitas properti di 25 negara anggota OECD. Kesenjangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah dapat menimbulkan rasa iri dan

putus asa. Kalangan berpendapatan rendah melihat kemewahan di sekitarnya, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk mencapainya secara legal, sehingga menilai bahwa melakukan kriminalitas properti adalah cara cepat dan menguntungkan untuk mencapai kepuasan. Amilia & Ridwan (2024) serta Ikhsan & Amri (2023) juga telah menemukan pengaruh positif ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Indonesia.

Ketimpangan pendapatan dapat diukur melalui rasio gini karena mampu menunjukkan sejauh mana distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat merata atau timpang. Gini rasio dihitung berdasarkan kurva Lorenz, yang menggambarkan proporsi kumulatif pendapatan terhadap proporsi kumulatif penduduk. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (Corrado, 1912 dalam Todaro & Smith, 2020). Berikut ini adalah gambaran ketimpangan pendapatan yang diukur oleh rasio gini untuk Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Tahun 2015-2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah (2026).

Gambar 2. Rata-rata Rasio Gini per Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2015-2024

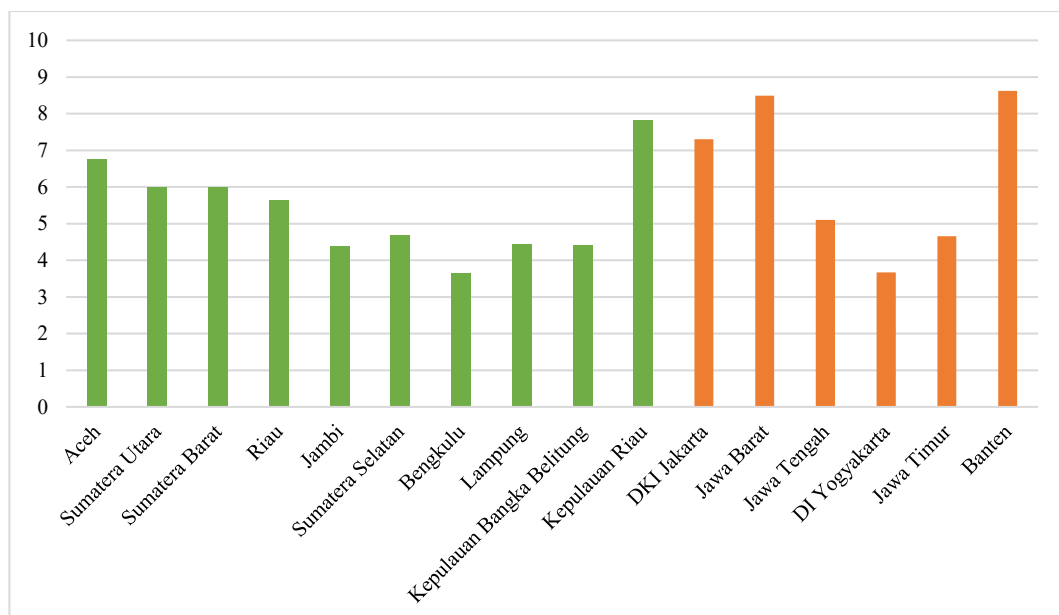
Menurut Todaro & Smith (2020), wilayah dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi umumnya memiliki rasio gini antara 0,50 hingga 0,70, kemudian wilayah dengan ketimpangan pendapatan yang rendah memiliki nilai rasio gini berkisar antara 0,20 hingga 0,35. Sedangkan, rasio gini 0,35 hingga 0,50 berada di tingkat sedang.

Periode 2015-2024 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan Sumatera. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa dengan rata-rata gini rasio DKI Jakarta (0,41), Jawa Barat (0,41), Jawa Tengah (0,36), DI Yogyakarta (0,43), Jawa Timur (0,38), Banten (0,37) masuk dalam kategori tingkat ketimpangan pendapatan sedang. Sedangkan, di Pulau Sumatera ketimpangan pendapatan berada di tingkat rendah yaitu untuk provinsi Aceh (0,31), Sumatera Utara (0,31), Sumatera Barat (0,30), Riau (0,33), Jambi (0,33), Sumatera Selatan (0,34), Bengkulu (0,34) dan Lampung (0,33).

Fauzan dkk. (2023) menyatakan struktur ekonomi di Pulau Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi memiliki jumlah penduduk yang banyak. Hal ini, apabila tidak diiringi dengan kesempatan kerja dapat menyebabkan sebagian besar peningkatan pendapatan hanya dinikmati kelompok tertentu dan menciptakan kesenjangan yang lebih lebar antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah. Sedangkan, Hadi dkk. (2024) menyatakan di Sumatera pertumbuhan ekonomi relatif lebih merata dan distribusi pendapatan tidak setimpang di Jawa karena dominannya masih di sektor primer. Dari perbedaan tersebut, penting untuk melihat bagaimana ketimpangan pendapatan dapat mempengaruhi kriminalitas di kedua pulau dengan perbedaan ketimpangan pendapatan tersebut.

Selain ketimpangan pendapatan, faktor sosial ekonomi selanjutnya yang memengaruhi kriminalitas properti adalah tingkat pengangguran. Menurut BPS (2023), pengangguran adalah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja namun tidak bekerja, sedang mempersiapkan usaha baru, atau tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Urowoli & Alero (2022) mengungkapkan bahwa pengangguran mengakibatkan meningkatnya

tekanan ekonomi, frustrasi dan hilangnya peluang mencapai stabilitas nasional sehingga mendorong individu untuk melakukan kriminalitas di Nigeria. Jika peluang mendapatkan uang secara legal tertutup, dan manfaat yang didapat dari mencuri dinilai lebih besar daripada risiko yang dihadapi, maka tindak kriminalitas menjadi pilihan yang rasional. Didukung oleh penelitian di 25 negara anggota OECD pada periode 2013-2018 oleh Ozlem (2022) yang juga menyatakan pengangguran memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap tingkat pencurian yang dihasilkan oleh struktur kapitalis. Berikut ini adalah grafik tingkat pengangguran terbuka provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera di Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah (2026).

Gambar 3. Rata-rata Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka per Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2015-2024

Selama periode 2015-2024, tingkat pengangguran terbuka di beberapa provinsi di Pulau Jawa yaitu Banten (8,62%), Jawa Barat (8,48%) dan DKI Jakarta (7,30%) cenderung lebih tinggi daripada provinsi lainnya. Sementara itu di Sumatera, tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi terdapat di Kepulauan Riau (7,82%). Meskipun daerah di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta dan Banten merupakan pusat ekonomi nasional, hal ini juga menjadi tantangan untuk dapat mengurangi pengangguran. Kondisi ini mengindikasikan wilayah dengan aktivitas

ekonomi yang tinggi justru menghadapi tantangan besar dalam menyerap tenaga kerja (Domini & Sitorus, 2025). Sedangkan, tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar serta pertumbuhan ekonomi yang belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal (Maidiansyah, 2022;Rajid, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengangguran sebagai faktor ekonomi yang mendorong tindak kriminalitas properti secara komparatif di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Selanjutnya, kepadatan penduduk juga memiliki pengaruh penting terhadap kasus kejadian kriminalitas properti yang dapat ditinjau dalam sudut pandang ekonomi. Ahmad et al. (2024) mengungkapkan penelitiannya di dua wilayah Malaysia bahwa ukuran populasi dapat meningkatkan kriminalitas properti, dimana penduduk yang padat menciptakan peluang kriminalitas yang besar karena persaingan sumber daya dan buruknya tata kelola ruang. Penelitian Shahid et al. (2024) dan Sitanggang (2024) juga mengungkapkan bahwa persaingan sumber daya dan layanan dasar akibat meningkatnya kepadatan penduduk dapat meningkatkan kriminalitas.

Tabel 3. Kepadatan Penduduk Per Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera 2024

Provinsi	Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM²)
Aceh	98
Sumatera Utara	215
Sumatera Barat	139
Riau	75
Jambi	76
Sumatera Selatan	102
Bengkulu	105
Lampung	281
KEP. Bangka Belitung	92
KEP. Riau	264
DKI Jakarta	16.165
Jawa Barat	1.359
Jawa Tengah	1.104
DI Yogyakarta	1.186
Jawa Timur	870
Banten	1.329

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024.

Dari data di atas, terlihat bahwa perbedaan kepadatan penduduk antara Pulau Jawa dan Sumatera sangat timpang. Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih tinggi (Arif & Nurwati, 2022). Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang memilih menetap di Pulau Jawa demi mengharapkan kehidupan yang lebih layak. Namun, kepadatan penduduk yang tinggi dengan tata kelola yang buruk dapat meningkatkan kriminalitas karena adanya persaingan sumber daya (Sitanggung & Hutapia, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh kepadatan penduduk terhadap kriminalitas properti dan apakah ada perbedaan yang signifikan pengaruh di Pulau Jawa yang memiliki kepadatan penduduk sangat tinggi dan di Pulau Sumatera dengan kepadatan penduduk yang lebih rendah jika dibandingkan Jawa.

Selain kepadatan penduduk, migrasi juga mulai mendapatkan sorotan penting dalam penelitian terhadap kriminalitas properti. Migrasi memiliki arti perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan menetap atau sementara. Penelitian tentang migrasi menjadi hal yang menarik dilakukan karena migrasi dapat merubah struktur penduduk suatu wilayah yang pada akhirnya berdampak ke banyak aspek seperti pembangunan daerah, kesejahteraan serta konflik sosial (Odabasi, 2021).

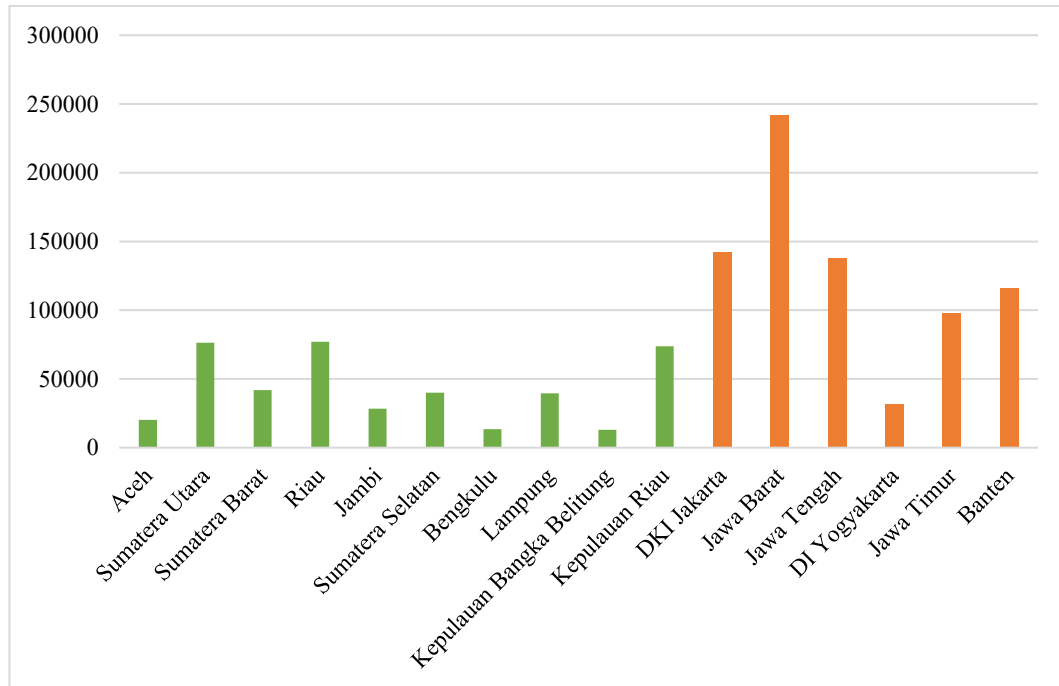
Dalam beberapa penelitian terdahulu, migrasi memiliki pengaruh yang beragam terhadap kriminalitas properti. Mariani & Mercier (2021) menyatakan bahwa keputusan bermigrasi didahului oleh pertimbangan rasional mengenai kesejahteraan dan keuntungan ekonomi. Mereka yang bermigrasi umumnya adalah individu yang termotivasi untuk bekerja secara legal dan mencari kesejahteraan. Migrasi justru dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan insentif kriminal. Selain itu, adanya pengawasan sosial yang baik juga akan membuat imigran tidak memutuskan untuk melakukan tindakan ilegal ketika mereka berada di wilayah yang baru.

Didukung penelitian Han & Piquero (2022) yang menyatakan konsentrasi imigran yang lebih tinggi dapat menurunkan kriminalitas propoerti karena konsentrasi

imigran dapat membawa efek revitalisasi bagi lingkungan, yaitu memunculkan aktivitas ekonomi, jaringan antartetangga dan kontrol sosial informal yang membuat warga lebih mampu menjaga ketertiban bersama. Komunitas imigran sering membentuk ikatan keluarga, agama, dan budaya yang kuat sehingga dapat memperkuat rasa saling percaya serta meningkatkan kemampuan warga untuk saling mengawasi dan menanggapi masalah di lingkungan mereka. Akibatnya, wilayah dengan konsentrasi imigran yang lebih tinggi cenderung memiliki kejahatan properti yang lebih rendah, meskipun efek ini tetap bergantung pada kondisi wilayah tujuan.

Namun penelitian lainnya milik (Odabasi, 2021) menyatakan bahwa para imigran dapat menghadapi hambatan ekonomi, masalah adaptasi dan diskriminasi. Ketika arus migrasi terjadi dalam skala besar dan tidak diimbangi dengan kapasitas ekonomi dan layanan publik yang memadai dan melemahnya kohesi sosial, maka dapat menyebabkan sebagian individu menghadapi tekanan sosial dan upah rendah yang meningkatkan risiko kriminalitas properti. Oleh karena itu, kemampuan struktural wilayah tujuan dalam mengelola integrasi ekonomi memiliki peran penting dalam permasalahan migrasi.

Sehingga dalam hal ini, pengaruh migrasi terhadap kriminalitas properti dapat berbeda yang dipengaruhi oleh berbagai aspek baik dari sisi imigran maupun dari sisi wilayah tujuan. Namun, penelitian mengenai pengaruh variabel migrasi terhadap kriminalitas properti masih sangat terbatas baik di Pulau Jawa dan Sumatera maupun di Indonesia secara keseluruhan. Sehingga, memasukkan variabel migrasi dapat menjadi temuan menarik dalam penelitian mengenai kriminalitas properti.



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah (2025).

Gambar 4. Rata-Rata Jumlah Penduduk yang Melakukan Pindah Masuk Antarprovinsi (Migrasi Masuk Internal) di Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2015-2024

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar provinsi-provinsi di Pulau Jawa menarik arus migrasi masuk yang tinggi. Jawa Barat (242.110 penduduk masuk), DKI Jakarta (142.228 penduduk masuk) Jawa Tengah (137.586 penduduk masuk) dan Banten (115.677 penduduk masuk) merupakan provinsi dengan arus migrasi masuk yang besar. Fenomena ini disebut juga dengan “*Java-centric*” yaitu Pulau Jawa yang menjadi perhatian karena memiliki struktur ekonomi dan pembangunan yang lebih unggul seperti upah minimum yang lebih tinggi, akses infrastruktur yang lebih maju dan standar hidup yang lebih baik (Manik *et al.*, 2026). Sedangkan di Sumatera, migrasi masuk ke provinsi relatif lebih rendah, hal ini karena perbedaan struktur sosial ekonomi dan tingkat konsentrasi pembangunan. Wilayah di Pulau Sumatera masih memiliki struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor primer. Selain itu, pembangunan dan infrastruktur di Sumatera belum secepat dan tidak selengkap di Jawa. Sehingga, dalam hal ini, Jawa memiliki kekuatan faktor penarik (*pull factors*) yang lebih kuat dibanding Sumatera (Krisnandita &

Sudibia, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh migrasi terhadap kriminalitas properti di dua wilayah dengan arus migrasi yang berbeda serta apakah ada perbedaan hasil atau tidak untuk kedua wilayah tersebut.

Dari penjelasan mengenai pengaruh migrasi terhadap kriminalitas properti di atas, peran pasar kerja memiliki keterkaitan dengan migrasi masuk. Oleh karena itu, selain berpengaruh secara langsung terhadap kriminalitas properti, migrasi masuk antarprovinsi juga diduga dapat memengaruhi hubungan antara Tingkat Pengangguran dan kriminalitas properti. Arus migrasi masuk dapat menyebabkan perubahan kondisi pasar kerja yang diakibatkan bertambahnya jumlah penduduk dan tenaga kerja di suatu wilayah. Pada satu sisi, migrasi dapat memberikan dampak positif karena meningkatkan aktivitas ekonomi dan ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan. Namun, pada sisi lain, migrasi juga dapat memengaruhi kondisi pasar tenaga kerja di wilayah tujuan karena bertambahnya jumlah penduduk yang masuk (Mariani & Mercier, 2021).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pengangguran terhadap kriminalitas properti dapat berbeda pada arus migrasi yang berbeda. Pergerakan penduduk dapat memengaruhi kondisi pasar tenaga kerja dan aktivitas ekonomi di wilayah tujuan. Selain itu, migran dan penduduk lokal sering kali memiliki karakteristik yang berbeda dalam menyikapi pengangguran yang terjadi. Sebagian migran umumnya telah mempersiapkan risiko pengangguran ketika masuk ke wilayah tujuan dengan harapan memperoleh peluang kerja dan pendapatan yang lebih baik kedepannya. Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pengangguran terhadap kriminalitas properti dapat berubah ketika terjadi arus migrasi masuk (Coccia *et al.*, 2024). Sehingga, migrasi tidak hanya berperan sebagai faktor yang memengaruhi kriminalitas properti secara langsung, tetapi juga dapat berperan sebagai moderasi dalam hubungan tingkat pengangguran dan kriminalitas properti. Oleh karena itu, penelitian ini juga ingin menguji apakah migrasi masuk dapat memoderasi pengaruh tingkat pengangguran terhadap kriminalitas properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

Dari uraian yang telah dijelaskan, Indonesia secara nasional tengah mengalami perubahan struktural dari sektor primer ke sektor industri dan jasa. Perubahan ini berpotensi menimbulkan ketegangan sosial yang dapat mendorong munculnya kriminalitas properti, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera yang tercatat sebagai dua wilayah dengan kasus kriminalitas properti tertinggi di Indonesia. Namun, transformasi tersebut berlangsung dengan tahapan yang berbeda. Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan, industri, dan perdagangan nasional, memiliki tingkat pembangunan yang lebih maju. Namun, hal tersebut juga menjadikan tekanan sosial ekonomi juga lebih kompleks di Pulau Jawa. Sementara, Sumatera memiliki struktur ekonomi yang lebih agraris dengan struktur wilayah yang masih mengalami masa adaptasi tahap perubahan ke sektor industri dan jasa. Pulau Sumatera memiliki tekanan sosial ekonomi lebih rendah jika dibandingkan dengan Pulau Jawa. Penelitian ini ingin mengetahui apakah kondisi sosial ekonomi yang berbeda tersebut dapat memiliki pengaruh yang signifikan dan sama terhadap kriminalitas properti. Kemudian, apabila signifikan di kedua wilayah, apakah pengaruhnya akan lebih sensitif di wilayah dengan permasalahan sosial ekonomi yang lebih tinggi atau justru menghasilkan dampak yang sebaliknya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perbandingan pengaruh faktor sosial ekonomi yaitu ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran, kepadatan penduduk, migrasi masuk antarprovinsi terhadap kasus kejadian kriminalitas properti serta mengetahui apakah migrasi masuk antarprovinsi memoderasi pengaruh tingkat pengangguran terhadap kasus kejadian kriminalitas properti di Pulau Jawa dan Sumatera. Penelitian ini berjudul “Analisis Komparatif Struktur Sosial Ekonomi Terhadap Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2015-2024,” menggunakan data panel provinsi Pulau Jawa dan Sumatera selama periode 2015-2024 guna memperoleh gambaran empiris mengenai pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap kasus kejadian kriminalitas properti dan membandingkan hasilnya di antara kedua wilayah tersebut.

Pemilihan tahun 2015 sebagai periode awal penelitian didasarkan pada konsistensi data yang digunakan dalam analisis. Sejak tahun 2015, Badan Pusat Statistik (BPS)

melakukan perubahan dalam cakupan pengukuran kriminalitas pada Susenas Kor dengan memperluas klasifikasi jenis kejahatan menjadi lebih rinci, sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih representatif. Pemilihan tahun 2015-2024 juga didasarkan pada 2 periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan 2020-2024 yang tidak hanya menekankan pembangunan inklusif dan pemerataan ekonomi, tetapi juga peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Selain itu, rentang waktu tersebut menangkap perubahan struktural yang signifikan dalam perekonomian, termasuk periode pra, masa dan pasca pandemi Covid-19 yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi di berbagai daerah. Dengan demikian, rentang waktu 2015-2024 dipilih untuk mencerminkan satu dekade kondisi sosial ekonomi dan kebijakan pembangunan yang signifikan di Indonesia.

Penelitian ini memiliki urgensi untuk memahami faktor-faktor yang mendorong terjadinya kriminalitas properti di dua pulau dengan kasus kriminalitas properti tinggi dan kondisi sosial ekonomi yang berbeda, yaitu Pulau Jawa dan Sumatera. Penelitian di Indonesia sebelumnya lebih banyak menggunakan kriminalitas agregat bukan kriminalitas properti yang berfokus pada jenis kasus kriminalitas yang tinggi dan berasal dari motif ekonomi. Selain itu, sebagian besar penelitian menganalisis di tingkat nasional atau wilayah tertentu tanpa mempertimbangkan perbedaan antarwilayah. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut melalui analisis komparatif antara Pulau Jawa dan Sumatera. Adapun variabel migrasi serta pengaruh migrasi dalam memoderasi pengangguran dapat menjadi temuan menarik karena variabel tersebut relatif masih jarang digunakan dalam studi kriminalitas di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam penyusunan kebijakan pembangunan terutama dalam upaya pencegahan kriminalitas melalui perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Dari fenomena di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera?
3. Bagaimana pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera?
4. Bagaimana pengaruh Migrasi Masuk Antarprovinsi terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera?
5. Bagaimana Migrasi Masuk Antarprovinsi memoderasi pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera?
6. Bagaimana pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pengangguran, Kepadatan Penduduk, Migrasi Masuk Antarprovinsi dan efek moderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi pada pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui bagaimana pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.
4. Mengetahui bagaimana pengaruh Migrasi Masuk Antarprovinsi terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.
5. Mengetahui bagaimana Migrasi Masuk Antarprovinsi memoderasi pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

6. Mengetahui bagaimana pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pengangguran, Kepadatan Penduduk, Migrasi Masuk Antarprovinsi, dan efek moderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi pada pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

1.4. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang ilmu ekonomi dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor sosial ekonomi yang dapat memengaruhi kasus kejadian kriminalitas properti. Selain itu, analisis komparatif antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera memberikan nilai teoritis tambahan dengan menunjukkan apakah perbedaan karakteristik wilayah dan struktur ekonomi dapat menghasilkan variasi pengaruh yang signifikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan dan Tenaga Kerja serta aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan pengendalian kriminalitas berbasis bukti empiris. Pendekatan ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana kondisi sosial ekonomi dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penurunan angka kriminalitas.
- b. Data dan hasil analisis dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh akademisi, peneliti dan mahasiswa sebagai referensi ilmiah dalam studi-studi yang berkaitan dengan tindak kriminalitas properti di Indonesia maupun di wilayah lainnya. Penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi pengembangan model analisis baru atau studi komparatif antarwilayah, baik di tingkat nasional maupun internasional.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Ekonomi Kriminalitas

Teori ekonomi kriminalitas diperkenalkan oleh Becker (1968) melalui tulisannya yang berjudul *Crime and Punishment: An Economic Approach*. Becker memandang bahwa perilaku kriminal dapat dijelaskan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi yang sama dengan perilaku ekonomi lainnya, yakni bahwa individu bertindak secara rasional untuk memaksimalkan *utilitas* atau kepuasan hidupnya. Dengan demikian, keputusan seseorang untuk melakukan tindak kriminalitas bukan semata-mata dipengaruhi oleh faktor moral, sosial, atau psikologis, melainkan merupakan hasil dari pertimbangan rasional terhadap manfaat (*benefit*) dan biaya (*cost*) yang akan diterima dari tindakan tersebut.

Menurut Becker, setiap individu dihadapkan pada dua pilihan, yaitu melakukan kegiatan legal atau kegiatan ilegal. Keputusan untuk melakukan kriminalitas akan diambil apabila manfaat yang diharapkan dari melakukan kriminalitas (kegiatan ilegal) lebih besar dibandingkan manfaat dari kegiatan legal setelah memperhitungkan risiko tertangkap dan sanksi yang diterima. Becker merumuskan keputusan tersebut dalam bentuk *expected utility*, di mana individu akan memutuskan untuk melakukan kriminalitas apabila nilai *expected utility* dari kriminalitas lebih besar daripada *expected utility* dari pekerjaan legal (Hjalmarsson *et al.*, 2024).

Artinya, seseorang akan terdorong melakukan kriminalitas apabila potensi keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ilegal (misalnya pencurian atau perampokan) setelah dikurangi risiko tertangkap dan sanksi hukum, masih lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh dari kegiatan legal. Sebaliknya, apabila

pendapatan legal meningkat atau risiko hukuman lebih besar, maka *expected utility* dari kriminalitas menurun dan individu akan memilih aktivitas ekonomi yang sah. Model Becker menjelaskan bahwa perilaku kriminal dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi di masyarakat dimana semakin tinggi pengangguran dan keterbatasan mendapatkan pendapatan secara legal, maka *opportunity cost* melakukan kriminalitas menjadi kecil, sehingga insentif untuk bertindak kriminal meningkat (Hjalmarsson *et al.*, 2024).

2.1.2. Teori Ketegangan / *Strain*

Teori *Strain* pertama kali diperkenalkan oleh Robert K. Merton (1938) untuk menjelaskan hubungan antara struktur sosial dan tekanan yang memunculkan perilaku menyimpang atau kriminalitas dalam masyarakat. Merton berpendapat bahwa setiap masyarakat memiliki tujuan budaya (*cultural goals*) yang diinginkan seperti keberhasilan ekonomi, kesejahteraan, dan status sosial. Namun, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sarana legal untuk mencapai tujuan tersebut. Ketimpangan inilah yang menciptakan tekanan. Akibatnya, sebagian individu yang mengalami keterbatasan akan beradaptasi terhadap tekanan tersebut dengan cara yang menyimpang, termasuk melakukan tindak kriminal untuk mencapai tujuan ekonomi yang diidealkan oleh masyarakat.

Selanjutnya, teori Strain berkembang menjadi teori deprivasi relatif (*Relative Deprivation Theory*) yang dikemukakan oleh Runciman (1966). Teori ini memperluas gagasan Merton dengan menambahkan dimensi psikologis dan perbandingan sosial. Menurut Runciman, individu tidak hanya merasa tertekan karena kemiskinan absolut, tetapi juga karena mereka membandingkan diri dengan kelompok lain yang lebih sejahtera. Ketika seseorang menyadari adanya kesenjangan antara posisinya dan kelompok yang lebih kaya, muncul rasa ketidakpuasan, iri, dan frustrasi yang dapat mendorong perilaku kriminal (Itskovich, 2025).

Para peneliti ekonomi khususnya yang membahas tentang kriminalitas mengadopsi gagasan Merton dan Runciman untuk menjelaskan bahwa kriminalitas juga

merupakan hasil dari ketimpangan distribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi di masyarakat. Dalam bidang ekonomi, kondisi ini terjadi ketika ketimpangan pendapatan meningkat, sehingga menciptakan rasa ketidakadilan dan ketegangan sosial yang memperbesar kemungkinan seseorang melakukan kriminalitas untuk mencapai standar hidup yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, teori Strain memberikan kerangka yang komplementer terhadap teori ekonomi kriminalitas dengan menyoroti peran ketidakmerataan, menciptakan tekanan yang berujung pada meningkatnya kriminalitas (Septriani, 2024; Rahmah *et al.*, 2024).

2.1.3. Teori Kependudukan Malthus

Robert Malthus (1798) dalam *An Essay on the Principle of Population* berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk cenderung lebih cepat daripada pertumbuhan ketersediaan pangan dan sumber daya. Menurutnya, penduduk tumbuh secara geometris (2, 4, 8, 16, ...), sementara produksi pangan hanya tumbuh secara aritmetis (2, 4, 6, 8, ...). Ketidakseimbangan ini, apabila tidak dikendalikan, akan menimbulkan tekanan pada sumber daya, memicu kelangkaan, penurunan kualitas hidup, hingga kelaparan, wabah penyakit, dan konflik sosial. Pandangan ini menekankan sisi pesimistis bahwa penduduk yang terlalu banyak justru menjadi beban.

Dalam penelitian ini, pandangan Malthus digunakan untuk menjelaskan bagaimana peningkatan kepadatan penduduk berpotensi memicu konflik sosial yaitu meningkatnya kriminalitas properti akibat tekanan terhadap sumber daya ekonomi dan sosial yang menjadi semakin besar. Kondisi ini dapat menimbulkan persaingan tinggi dalam memperoleh kebutuhan dasar. Akibatnya, sebagian individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya melalui cara legal dapat terdorong untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk kriminalitas terhadap properti, sebagai alternatif untuk bertahan hidup (Wulan Dari & Asnidar, 2022).

Dengan demikian, teori Malthus memberikan teoritis bahwa kepadatan penduduk yang tinggi yang tidak diimbangi dengan kebijakan dan layanan dasar yang relevan dapat menciptakan tekanan sosial dan ekonomi yang menjadi faktor pendorong

timbulnya kriminalitas (Sabiq & Nurwati, 2021). Teori ini relevan untuk memahami bagaimana tekanan akibat pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan sumber daya dapat berkontribusi terhadap variasi kejadian kriminalitas properti antarwilayah.

2.1.4. Teori Migrasi Harris-Todaro

Teori Migrasi Harris-Todaro yang dikemukakan oleh John R. Harris dan Michael P. Todaro menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk melakukan migrasi pada dasarnya merupakan hasil pertimbangan ekonomi yang rasional. Menurut teori ini, individu akan membandingkan manfaat ekonomi yang diharapkan di daerah tujuan dengan manfaat yang dapat diperoleh di daerah asal. Keputusan untuk berpindah tidak hanya ditentukan oleh perbedaan tingkat pendapatan yang berlaku saat ini, tetapi juga oleh peluang memperoleh pekerjaan dan pendapatan di masa mendatang. Oleh karena itu, seseorang akan memilih bermigrasi apabila pendapatan yang diharapkan di daerah tujuan lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang dapat diperoleh di daerah asal (Todaro & Smith, 2020).

Teori Harris-Todaro menjelaskan bahwa penduduk cenderung berpindah menuju wilayah yang memiliki tingkat pembangunan ekonomi yang lebih tinggi, kesempatan kerja yang lebih luas, upah yang lebih baik, serta akses yang lebih memadai terhadap fasilitas dan layanan publik. Daya tarik tersebut menciptakan ekspektasi bahwa kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi akan meningkat setelah melakukan migrasi. Bahkan ketika terdapat persaingan yang tinggi dalam memperoleh pekerjaan di daerah tujuan, arus migrasi tetap dapat berlangsung selama peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar masih dianggap menguntungkan dibandingkan kondisi di daerah asal (Nagashima, 2018).

Para migran tidak terlalu mempermasalahkan tingginya tingkat pengangguran di daerah tujuan karena keputusan migrasi didasarkan pada pendapatan yang diharapkan, bukan pada kepastian memperoleh pekerjaan. Selama peluang memperoleh pendapatan di daerah tujuan masih lebih besar dibandingkan pendapatan yang dapat diperoleh di daerah asal, individu tetap memiliki insentif

untuk bermigrasi. Dengan demikian, migrasi dipengaruhi oleh harapan akan kondisi ekonomi yang lebih baik di masa depan (Lee, 2008).

Selain itu, migran umumnya memandang pengangguran sebagai kondisi sementara yang harus dihadapi untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar di kemudian hari. Mereka bersedia menanggung risiko belum mendapatkan pekerjaan karena meyakini bahwa daerah tujuan menawarkan peluang kerja, upah, dan prospek kesejahteraan yang lebih baik. Oleh sebab itu, menurut Harris-Todaro, arus migrasi dapat terus berlangsung meskipun tingkat pengangguran di daerah tujuan relatif tinggi (Lee, 2008).

Teori Harris-Todaro digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan hubungan antara migrasi dan kriminalitas properti melalui mekanisme pasar tenaga kerja dan ekspektasi ekonomi individu. Migrasi terjadi karena adanya harapan memperoleh kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih baik di wilayah tujuan. Ketika harapan tersebut terealisasi, migran dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif dan memperoleh sumber pendapatan yang legal sehingga dapat mengurangi tekanan ekonomi yang sering dikaitkan dengan tindakan kriminalitas properti. Namun, tidak semua migran berhasil segera memperoleh pekerjaan setelah berpindah, sehingga sebagian di antaranya justru menghadapi tekanan ekonomi yang pada akhirnya berpotensi mendorong tindakan kriminalitas properti.

2.1.5. Kriminalitas dan Kriminalitas Properti

Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan atau perilaku yang melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku, serta dapat merugikan individu maupun masyarakat (Kurniasih dkk., 2024). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam publikasi BPS (2024) kriminalitas dibagi ke dalam beberapa klasifikasi yaitu sebagai berikut.

- a. Kriminalitas terhadap nyawa, terdiri dari pembunuhan dan kelalaian yang mengakibatkan orang mati.
- b. Kriminalitas terhadap fisik yang melibatkan luka atau bertujuan menyakiti orang lain, terdiri dari penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga,

- pengeroyokan, pengancaman, penculikan, kriminalitas perdagangan manusia, pemerasan, kelalaian yang mengakibatkan orang luka, penghinaan.
- c. Kriminalitas terhadap kesusilaan, termasuk pemerkosaan, pencabulan, kekerasan seksual dan persetubuhan terhadap anak.
 - d. Kriminalitas terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan, terdiri dari pencurian dengan kekerasan.
 - e. Kriminalitas terhadap hak milik/barang tanpa penggunaan kekerasan, terdiri dari pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengrusakan/penghancuran barang dan pembakaran dengan sengaja.
 - f. Kriminalitas terkait narkoba dan obat-obatan, terdiri dari narkoba dan psikotropika dan menjual atau mengedarkan obat keras/bebas tanpa izin.
 - g. Kriminalitas terkait penipuan, penggelapan dan korupsi, termasuk penipuan/perbuatan curang, penggelapan, korupsi dan penadahan.
 - h. Kriminalitas terhadap ketertiban umum.
 - i. Kriminalitas terhadap keamanan publik dan negara, terdiri dari membahayakan keamanan umum, penyalahgunaan senjata tajam, senjata api dan bahan peledak serta kecelakaan lalu lintas.
 - j. Kriminalitas terhadap lingkungan hidup, terdiri dari perusakan hutan, perikanan, pertambangan, minyak dan gas.

Menurut Shahid et al. (2024) kriminalitas properti adalah jenis kriminalitas yang berkaitan dengan pengambilan atau perusakan harta benda milik orang lain. Kriminalitas ini umumnya timbul karena motif sosial ekonomi, yaitu dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan materi secara instan ketika akses terhadap sumber ekonomi yang sah terbatas. Dengan kata lain, tekanan ekonomi, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan sering mendorong individu untuk melakukan kriminalitas properti sebagai cara cepat mendapatkan sumber daya finansial (Anozi & Novianda, 2023; Anggrayni, 2022).

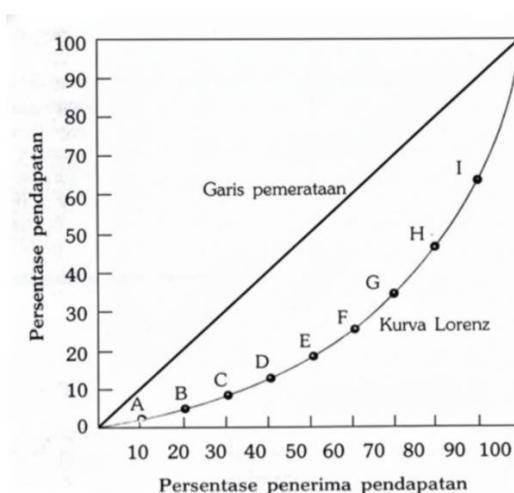
Dalam publikasi BPS mengenai statistik kriminal (2025), kriminalitas hak/milik atau kriminalitas properti terdiri dari dua bagian yaitu dengan kekerasan dan tanpa kekerasan. Dalam Pasal 479 KUHP 2023, disebutkan bahwa segala bentuk

kriminalitas yang tujuan utamanya menyerang hak milik atau harta benda tetap disebut kriminalitas terhadap harta kekayaan. Jadi, menurut hukum Indonesia, kriminalitas hak milik baik dengan kekerasan atau tanpa kekerasan tetap dianggap sebagai kriminalitas properti karena objek utamanya adalah harta benda. Sehingga dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kriminalitas properti adalah segala bentuk kriminalitas yang tujuan utamanya menyerang kepemilikan atau properti baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi ketika distribusi pendapatan di suatu masyarakat tidak merata, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah. Dalam situasi ini, sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi, sementara sebagian besar lainnya hanya memperoleh porsi kecil dari total pendapatan nasional. Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai pemerataan hasil pembangunan ekonomi, karena mencerminkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Yuliana Putri & Aminda, 2024).

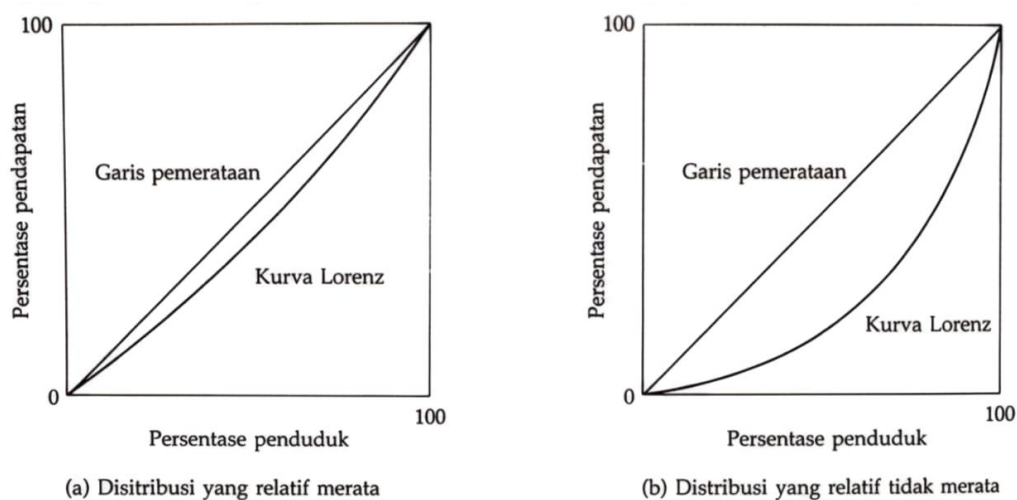
2.1.6.1. Kurva Lorenz



Sumber: Todaro & Smith 2020.

Gambar 5. Kurva Lorenz

Menurut Todaro dan Smith (2020) salah satu metode untuk menganalisis ketimpangan pendapatan adalah melalui kurva Lorenz. Kurva ini menggambarkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerimaan pendapatan dan persentase pendapatan total yang sebenarnya diterima pada periode tertentu. Dalam gambar 6, sumbu horizontal dan sumbu vertikal dibagi menjadi sepuluh bagian yang sama yang berhubungan dengan masing-masing kelompok desil. Titik A memperlihatkan bahwa 10% penduduk dengan pendapatan terendah hanya memperoleh 1,8% dari total pendapatan, sementara titik B menunjukkan bahwa 20% penduduk terbawah menerima 5% dari total pendapatan, dan seterusnya untuk kelompok desil berikutnya. Pada titik tengah, 50% penduduk menguasai 19,8% dari pendapatan total. Semakin besar ketimpangan yang terjadi, semakin melengkung kurva Lorenz tersebut ke arah bawah sumbu horizontal.



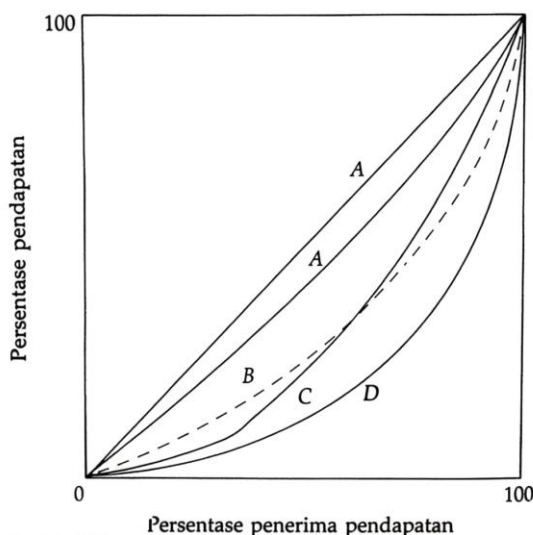
Sumber: Todaro & Smith 2020.

Gambar 6. Tingkat Ketimpangan Relatif Kurva Lorenz

Semakin jauh kurva Lorenz menyimpang dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi. Dalam kondisi ekstrem, ketimpangan yang sempurna digambarkan oleh kurva Lorenz yang menempel pada bagian bawah sumbu horizontal dan sisi kanan sumbu vertikal. Gambar 7 memperlihatkan dua bentuk distribusi pendapatan: gambar (a) menggambarkan distribusi yang relatif merata, sedangkan kurva (b) menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih timpang (Todaro & Smith, 2020).

2.1.6.2. Rasio Gini dan Ukuran Ketimpangan Agregat

Todaro & Smith (2020), ukuran selanjutnya untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah dengan menghitung rasio atau koefisien gini. Rasio gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang berkisar antara 0 (kemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Corrado Gini, seorang ahli statistik asal Italia pada tahun 1912, melalui karyanya yang berjudul *Variabilita e Mutabilia*. Sejak saat itu, Rasio Gini menjadi salah satu alat ukur yang banyak digunakan untuk menilai seberapa merata hasil pembangunan ekonomi dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.



Sumber: Todaro & Smith, 2020.

Gambar 7. Empat Kemungkinan Kurva Lorenz

Rasio Gini diperoleh dari interpretasi Kurva Lorenz. Negara dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi umumnya memiliki koefisien Gini antara 0,50 hingga 0,70, sedangkan negara dengan ketimpangan pendapatan yang lebih merata memiliki nilai Rasio Gini berkisar antara 0,20 hingga 0,35. Berdasarkan Gambar 8 yang menunjukkan “Kriteria Lorenz” dalam distribusi pendapatan, jika suatu kurva Lorenz terletak di atas kurva lainnya, maka perekonomian yang berada di posisi lebih atas mencerminkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Dalam ilustrasi tersebut, perekonomian A memiliki tingkat pemerataan yang lebih baik

dibandingkan perekonomian D. Namun, apabila dua kurva Lorenz saling berpotongan seperti pada kurva B dan C, hal ini menandakan perlunya analisis tambahan, misalnya untuk memahami masalah kemiskinan yang mungkin terjadi (Todaro & Smith, 2020).

2.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator penting dalam analisis pasar tenaga kerja yang menggambarkan proporsi jumlah angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan, meskipun secara aktif siap untuk bekerja. Menurut Case et al. (2021), tingkat pengangguran adalah jumlah orang yang menganggur yang merupakan persentase dari jumlah angkatan kerja. Agar disebut menganggur, orang tersebut harus tidak memiliki pekerjaan dan terus menerus secara aktif mencari kerja. Dalam Case *et al.*, (2021) disebutkan bahwa tingkat pengangguran tidak akan pernah mencapai nol meskipun perekonomian mencapai atau mendekati kapasitas penuh. Tingkat digunakan untuk menilai sejauh mana perekonomian mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia dan menjadi ukuran efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya manusia di suatu wilayah.

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Pengangguran terbuka biasanya muncul ketika pertumbuhan kesempatan kerja tidak sebanding dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang masih menghadapi permasalahan struktural dalam pasar tenaga kerja. Kondisi ini dapat disebabkan oleh keterbatasan lapangan pekerjaan, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri (*mismatch*), atau perlambatan aktivitas ekonomi yang mengurangi permintaan tenaga kerja (Al Farrell & Atmanti Hastarini Dwi, 2023).

2.1.7.1. Jenis-Jenis Pengangguran

Case *et al.*, (2021), membagi jenis-jenis pengangguran sebagai berikut.

1. Pengangguran Friksional (*Frictional Unemployment*)

Pengangguran friksional terjadi karena adanya jeda waktu antara seseorang meninggalkan pekerjaan lama dan menemukan pekerjaan baru. Para pekerja memiliki kemampuan dan preferensi yang berbeda. Sementara, arus informasi dan lowongan kerja tidak sempurna dan mobilitas geografis pekerja tidak instan. Para ekonom menyebutkan bahwa pengangguran friksional akan terus terjadi karena adanya perubahan komposisi permintaan antarindustri atau wilayah yang memerlukan waktu bagi para pekerja untuk beralih pekerjaan.

2. Pengangguran Struktural (*Structural Unemployment*)

Jenis pengangguran ini timbul akibat adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja yang berubah akibat perkembangan teknologi atau perubahan struktur ekonomi. Misalnya, pekerja di sektor pertanian yang kehilangan pekerjaan karena mekanisasi atau otomatisasi, namun belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan di sektor industri atau jasa. Pengangguran struktural cenderung bersifat jangka panjang dan membutuhkan intervensi kebijakan berupa pelatihan kerja, pendidikan vokasional, serta penyesuaian kurikulum pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan pasar.

3. Pengangguran Siklikal (*Cyclical Unemployment*)

Pengangguran siklikal berkaitan dengan fluktuasi kegiatan ekonomi secara makro, terutama saat terjadi resesi atau perlambatan ekonomi. Pada masa penurunan ekonomi, permintaan terhadap barang dan jasa menurun, sehingga perusahaan mengurangi produksi dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Sebaliknya, ketika ekonomi pulih, permintaan tenaga kerja kembali meningkat. Oleh karena itu, pengangguran siklikal erat kaitannya dengan siklus bisnis dan kebijakan fiskal maupun moneter yang diterapkan pemerintah.

4. Pengangguran Musiman (*Seasonal Unemployment*)

Pengangguran musiman terjadi karena fluktuasi permintaan tenaga kerja yang bergantung pada waktu atau musim tertentu. Contohnya, pengangguran di sektor pertanian pada saat di luar masa tanam atau panen, serta di sektor pariwisata pada musim sepi pengunjung. Pengangguran ini biasanya bersifat sementara, namun

dapat berdampak signifikan di wilayah yang ekonomi lokalnya sangat bergantung pada sektor musiman.

2.1.8. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan salah satu indikator demografis yang menggambarkan jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah per satuan luas tertentu, dihitung dalam satuan jiwa per kilometer persegi (Jiwa/Km²). Menurut BPS (2024), kepadatan penduduk didefinisikan sebagai rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah tempat tinggalnya. Indikator ini mencerminkan tingkat persebaran penduduk dan tekanan penduduk terhadap ketersediaan sumber daya di suatu daerah.

Tingkat kepadatan penduduk memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang luas. Di satu sisi, kepadatan penduduk yang tinggi dapat menjadi sumber potensi pembangunan dengan meningkatnya tenaga kerja dan aktivitas ekonomi yang dapat mendorong produktivitas wilayah. Namun di sisi lain, kepadatan penduduk yang berlebihan dapat menimbulkan tekanan terhadap sumber daya alam, infrastruktur, dan persaingan pemenuhan kebutuhan dasar. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan daya dukung wilayah dapat memunculkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi termasuk kriminalitas (Wulan Dari & Asnidar, 2022).

Kepadatan penduduk merupakan salah satu indikator demografis yang menggambarkan banyaknya penduduk yang menempati suatu wilayah tertentu dibandingkan dengan luas wilayah tersebut. Tingkat kepadatan penduduk tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, yang mencerminkan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk pada dasarnya ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi. Ketiga faktor ini menjadi komponen dasar dalam dinamika demografi yang secara tidak langsung memengaruhi tingkat kepadatan suatu wilayah (Rochayati, 2025).

Faktor kelahiran meningkatkan jumlah penduduk secara alami, sementara kematian mengurangnya. Apabila angka kelahiran jauh lebih tinggi dibandingkan angka kematian, maka jumlah penduduk akan bertambah dengan cepat, sehingga meningkatkan tingkat kepadatan, terutama di wilayah dengan luas terbatas. Sementara itu, migrasi berperan penting dalam mengubah distribusi penduduk antarwilayah. Arus migrasi masuk ke daerah yang memiliki peluang ekonomi dan fasilitas publik yang lebih baik akan meningkatkan kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Sebaliknya, migrasi keluar dapat menurunkan tingkat kepadatan penduduk di daerah asalnya (Tambunan *et al.*, 2024).

2.1.9. Migrasi Masuk Antarprovinsi

Dalam statistik mobilitas penduduk dan tenaga kerja BPS (2024) dijelaskan bahwa migrasi adalah seseorang yang melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk melintasi batas administratif dalam wilayah negara Indonesia dengan perubahan tempat tinggal biasa. Seseorang dikategorikan sebagai migran internal apabila tempat tinggal pada saat pendataan berbeda dari tempat tinggal sebelumnya atau tempat lahirnya menurut batas administratif.

Kemudian, migrasi juga terbagi dalam beberapa jenis, migrasi seumur hidup adalah istilah untuk penduduk yang tempat tinggal pada saat dilakukan survei berbeda dengan wilayah tempat lahirnya. Kemudian, migrasi risen adalah istilah untuk penduduk yang tempat tinggal pada saat survei berbeda dengan tempat tinggalnya lima tahun lalu. Selain itu, terdapat istilah migrasi masuk dan migrasi keluar, dimana migrasi masuk adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah masuk menuju wilayah tempat tinggal saat ini, sedangkan migrasi keluar adalah perpindahan penduduk dari wilayah saat ini menuju wilayah lainnya.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah migrasi masuk internal antarprovinsi, yaitu penduduk yang melakukan pindah masuk ke dalam suatu provinsi dalam tahun tersebut. Data ini merupakan data perpindahan penduduk antarprovinsi di dalam negeri sehingga tidak memperhitungkan penduduk masuk

dari luar negeri. Pemilihan migrasi masuk ke suatu provinsi dalam penelitian ini dikarenakan migrasi masuk antarprovinsi lebih mampu merefleksikan perubahan komposisi penduduk yang terjadi pada periode yang sama dengan data kriminalitas yang dianalisis. Migran masuk dipilih karena penelitian ini berfokus pada kondisi wilayah tujuan dan untuk melihat bagaimana mobilitas dan masuknya penduduk ke suatu wilayah dapat memengaruhi kondisi di wilayah tujuan.

Mariani & Mercier (2021) menyatakan bahwa imigran tidak selalu meningkatkan kriminalitas dibandingkan penduduk asli. Bahkan, dalam kondisi tertentu, kriminalitas imigran dapat lebih rendah. Migrasi dipengaruhi oleh proses *self-selection*, di mana individu yang memilih bermigrasi adalah mereka yang telah mempertimbangkan peluang ekonomi dan risiko. Selain itu, kebijakan dan risiko migrasi yang tinggi dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan. Ketika biaya migrasi meningkat, hanya individu yang memperkirakan akan memperoleh keuntungan besar yang memutuskan bermigrasi.

Adapun Han & Piquero (2022) menyatakan konsentrasi imigran yang lebih tinggi dianggap menurunkan kriminalitas karena konsentrasi imigran dapat membawa efek revitalisasi bagi lingkungan, yaitu memunculkan lebih banyak dukungan sosial, jaringan antartetangga, aktivitas ekonomi lokal, dan kontrol sosial informal yang membuat warga lebih mampu menjaga ketertiban bersama. Komunitas imigran sering membentuk ikatan keluarga, agama, dan budaya yang lebih kuat sehingga dapat memperkuat rasa saling percaya serta meningkatkan kemampuan warga untuk saling mengawasi dan menanggapi masalah di lingkungan mereka. Akibatnya, wilayah dengan konsentrasi imigran yang lebih tinggi cenderung memiliki kejahatan properti yang lebih rendah, meskipun efek ini tetap bergantung pada kondisi wilayah tujuan.

Namun, Odabasi (2021) menyatakan bahwa para imigran dapat menghadapi hambatan bahasa, masalah adaptasi dan diskriminasi. Ketika arus migrasi terjadi dalam skala besar dan tidak diimbangi dengan kesempatan kerja, kesempatan kerja, layanan publik yang memadai dan melemahnya kohesi sosial, maka dapat

menyebabkan sebagian individu menghadapi tekanan sosial dan upah rendah yang meningkatkan risiko kriminalitas properti. Akibatnya, persaingan kesejahteraan dan pasar kerja juga akan lebih ketat dan sebagian migran berpotensi memiliki pendapatan serta kesejahteraan yang tidak stabil. Dalam kondisi seperti ini, terutama bagi individu dengan keterampilan rendah, insentif untuk melakukan kriminalitas properti dapat meningkat.

Selain itu, migrasi juga berimplikasi pada perubahan struktur sosial dan ketimpangan ekonomi di wilayah tujuan. Peningkatan populasi dalam waktu relatif singkat dapat menimbulkan kesenjangan akses terhadap pekerjaan, perumahan, layanan publik, dan fasilitas sosial. Dalam situasi di mana kohesi sosial melemah dan tekanan ekonomi meningkat, potensi konflik sosial maupun tindakan kriminal cenderung lebih tinggi. Oleh karena itu, hubungan antara migrasi dan kriminalitas juga dicerminkan konsekuensi dari tekanan sosial ekonomi daripada hanya karakteristik individu yang melakukan migrasi (Odabasi, 2021).

2.1.10. Hubungan Antar-Variabel

a. Hubungan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas Properti

Ketimpangan pendapatan memiliki hubungan dengan kasus kejadian kriminalitas properti karena semakin lebar kesenjangan maka akan semakin besar pula dorongan bagi individu berpendapatan rendah untuk melakukan kriminalitas properti. Ketimpangan pendapatan menciptakan rasa ketidakadilan bagi kelompok berpendapatan rendah, sehingga meningkatkan motivasi untuk melakukan tindak kriminal seperti pencurian atau perampokan demi memenuhi kebutuhan hidup dan kesetaraan. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan dapat menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya kriminalitas properti di suatu wilayah (Ozlem, 2022).

b. Hubungan Tingkat Pengangguran Terhadap Kriminalitas Properti

Tingkat pengangguran memiliki hubungan dengan kriminalitas properti karena ketika seseorang kehilangan sumber pendapatan, ia akan menimbang antara manfaat dari melakukan kriminalitas dan risiko hukuman yang mungkin

diterima. Dalam kondisi sulit, pengangguran menciptakan tekanan ekonomi, rasa frustrasi, serta hilangnya rasa tujuan hidup, dorongan ekonomi untuk memperoleh keuntungan melalui cara ilegal dapat meningkat jika peluang mendapatkan penghasilan secara sah terbatas. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin besar kecenderungan individu untuk melakukan tindak kriminal terhadap properti karena adanya desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pertimbangan rasional terhadap manfaat dan risiko dari tindakan tersebut (Septriani, 2024).

c. Hubungan Kepadatan Penduduk Terhadap Kriminalitas Properti

Kepadatan penduduk berhubungan positif dengan kriminalitas properti karena wilayah dengan jumlah penduduk yang padat cenderung menghadapi tekanan sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. Kepadatan yang berlebih dapat memicu persaingan ketat dalam memperoleh sumber daya, perumahan, dan pendapatan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya kriminalitas terhadap harta benda. Selain itu, lingkungan yang padat sering kali menyulitkan pengawasan sosial dan penegakan hukum, sehingga memberikan peluang lebih besar bagi pelaku kriminalitas untuk bertindak (Ahmad *et al.*, 2024).

d. Hubungan Migrasi Masuk Antarprovinsi Terhadap Kriminalitas Properti

Migrasi masuk memiliki hubungan dua arah terhadap kasus kejadian kriminalitas properti. Migrasi dapat menurunkan kriminalitas karena imigran memunculkan lebih banyak dukungan sosial, jaringan antartetangga, aktivitas ekonomi lokal, dan kontrol sosial informal. Selain itu, ketika individu yang berpindah memiliki motivasi ekonomi untuk bekerja secara legal dan terserap dalam pasar kerja secara produktif, maka migrasi justru dapat meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi kriminalitas. Namun, migrasi juga dapat meningkatkan kriminalitas apabila imigran tidak dapat menyesuaikan diri di tempat baru, terjebak dalam ketegangan, layanan publik yang kurang memadai, kurangnya kesempatan kerja, dan melemahnya kohesi sosial (Han & Piquero, 2022; Mariani & Mercier, 2021; Odabasi, 2021; Shahid *et al.*, 2024).

e. Hubungan Tingkat Pengangguran Terhadap Kriminalitas Properti yang Dimoderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi

Migrasi masuk antarprovinsi diduga dapat memoderasi pengaruh tingkat pengangguran terhadap kriminalitas properti. Arus migrasi masuk dapat memengaruhi kondisi pasar tenaga kerja, tingkat persaingan serta perubahan aktivitas ekonomi di wilayah tujuan. Selain itu, migran dan penduduk lokal sering kali memiliki karakteristik yang berbeda dalam menyikapi pengangguran. Migran berpindah dengan harapan memperoleh peluang kerja dan pendapatan yang lebih baik di masa depan dan dapat menganggap pengangguran adalah risiko yang harus dihadapi sementara. Oleh karena itu, migrasi masuk antarprovinsi diduga memengaruhi kuat atau lemahnya pengaruh tingkat pengangguran terhadap kriminalitas properti sehingga perlu dianalisis sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

2.2. Tinjauan Empiris

Tabel 4. Tinjauan Empiris

No	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil
1.	Ozlem Dunder (2022)	<i>Economic Causes Theft in 25 OECD Countries: Dynamic Panel Data Analysis</i>	Variabel: Independen: Tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan, indeks harga konsumen, pengeluaran sosial negara, jumlah populasi. Dependen: Tingkat Kriminalitas properti (pencurian). Alat Analisis: Data Panel dengan Metode GMM.	Pengangguran, inflasi dan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pencurian. Adapun pengeluaran sosial dan jumlah populasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pencurian di 25 negara OECD.
2.	Diska Amalia, Purmini Ridwan (2024)	Analisis Tingkat Pendidikan, Pengangguran,	Variabel: Independen: Tingkat pendidikan, tingkat	Pengangguran dan ketimpangan pendapatan berpengaruh

No	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil
		Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kriminalitas di Bengkulu	<p>pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan.</p> <p>Dependen: Tingkat Kriminalitas.</p> <p>Alat Analisis: Data Panel dengan model terbaik REM.</p>	<p>positif signifikan terhadap kriminalitas. Adapun pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kriminalitas. Sedangkan, kemiskinan tidak berpengaruh signifikan di Bengkulu.</p>
3.	Muhammad Shahid, Khalil Ahmad, Muhammad Amir Inayat, Muhammad Kashif Banti (2024)	<i>Socio-Economic Determinants of Property Crime Across the Districts of Law Enforcement Agencies of Pakistan</i>	<p>Variabel:</p> <p>Independen: Jumlah polisi, jumlah tersangka kriminal yang belum tertangkap, tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, migrasi distrik.</p> <p>Dependen: Kasus Kriminalitas properti.</p> <p>Alat Analisis: OLS dengan data Cross-Section.</p>	<p>Jumlah polisi dan pendidikan negatif signifikan terhadap kriminalitas properti. Sedangkan, jumlah tersangka yang belum tertangkap, kemiskinan, kepadatan penduduk dan migrasi berpengaruh positif signifikan terhadap kriminalitas properti di Pakistan.</p>
4.	Ade Sintia Anggrayni (2022)	<i>The Effect of Economic Factors on Property Crime Rates</i>	<p>Variabel:</p> <p>Independen: PDRB, Pengangguran, kemiskinan, rasio gini, pengeluaran per kapita.</p> <p>Dependen: Kasus Kriminalitas properti.</p>	<p>PDRB berpengaruh negatif tidak signifikan, pengangguran berpengaruh positif tidak signifikan, kemiskinan berpengaruh positif signifikan, rasio gini berpengaruh</p>

No	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil
			Alat Analisis: Data panel dengan model terbaik FEM.	positif signifikan, pengeluaran per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap kriminalitas properti di Sumatera.
5.	Azizul Ahmad, Tarmiji Masron, Asykal Syakinah Mohd Ali, Yoshinari Kimura, Syahrul Nizam Junaini (2024)	<i>Demographic Dynamics and Urban Property Crime: A Linear Regrission Analysis in Kuala Lumpur and Putrajaya 2015-2020</i>	<p>Variabel:</p> <p>Independen: Total populasi, populasi laki-laki, populasi perempuan, kepadatan tempat tinggal, kepadatan penduduk.</p> <p>Dependen: Kasus Kriminalitas Properti</p> <p>Alat Analisis: Data panel, regresi linear berganda.</p>	<p>Populasi laki-laki, kepadatan tempat tinggal dan kepadatan penduduk memiliki hubungan positif terhadap kriminalitas properti. Sedangkan, populasi perempuan memiliki hubungan negatif signifikan terhadap kriminalitas properti di Kuala Lumpur dan Putrajaya.</p>
6.	Christiana Urowoli Ebobo (2022)	<i>The Nexus Among Unemployment, Poverty and Crime Contemporary Nigeria</i>	<p>Variabel:</p> <p>Independen: Tingkat pengangguran dan krmiskinan</p> <p>Dependen: Kriminalitas</p> <p>Alat Analisis: Analisis konten untuk melihat hubungan dua arah dengan data <i>cross-section</i>.</p>	<p>Pengangguran yang tinggi meningkatkan kemiskinan dan kemiskinan memperburuk pengangguran. Kombinasi kemiskinan dan pengangguran mendorong peningkatan kriminalitas dan ketidakamanan masyarakat Nigeria.</p>

No	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil
7.	Ikhsan, Amri (2023)	<i>Exploration of Macroeconomics Effects on Criminality in Indonesia</i>	<p>Variabel:</p> <p>Independen: Ketimpangan pendapatan, pendapatan per kapita, inflasi, pengangguran</p> <p>Dependen: Kasus Kriminalitas.</p> <p>Alat Analisis: ARDL.</p>	<p>Dalam jangka panjang, ketimpangan pendapatan, inflasi dan pengangguran mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia, sedangkan pendapatan perkapita berpengaruh negatif signifikan. Dalam jangka pendek, hanya ketimpangan pendapatan dan pendapatan per kapita yang berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia.</p>
8.	May Putriana Marghareta Br. Sitanggang, Hutapia (2024)	<i>The Effect of HDI, Population Density, Poverty and Income Inequality on Criminality in DKI Jakarta Province</i>	<p>Variabel:</p> <p>Independen: IPM, kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan</p> <p>Dependen: Kasus Kriminalitas.</p> <p>Alat Analisis: Data panel dengan model terpilih CEM.</p>	<p>IPM, kepadatan penduduk dan kemiskinan berpengaruh positif signifikan terhadap kriminalitas. Sedangkan, ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kriminalitas di DKI Jakarta.</p>
9.	Septriani (2023)	<i>The Impact of Economics Condition on Criminality in Indonesia</i>	<p>Variabel:</p> <p>Independen: Tingkat kemiskinan dan pengangguran.</p>	<p>Kemiskinan dan pengangguran memiliki hubungan positif signifikan terhadap</p>

No	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil
			<p>Dependen: Tingkat Kriminalitas.</p> <p>Alat Analisis: Data panel dengan model terpilih REM.</p>	<p>kriminalitas di Indonesia.</p>
10.	Fabian La Wima Vallesy, Timbang Sirait (2025)	<i>Property Crime in Java Island 2022 based on Demography and Socioeconomic Aspects using Spatial Analysis Approach</i>	<p>Variabel:</p> <p>Independen: Rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk.</p> <p>Dependen: Kasus Kejahatan Properti.</p> <p>Alat Analisis: <i>Geographically Weighted Negative Binomial Regression (GWNBR)</i>.</p>	<p>Variabel yang terbukti berpengaruh signifikan di seluruh wilayah di Jawa adalah angka harapan hidup dan rasio gini. Variabel rata-rata lama sekolah dan jumlah pendidikan berpengaruh di beberapa provinsi di Jawa.</p>
11.	Suzan Odabasi	<i>The Economics of Crime and Immigration: A Panel Data Analysis</i>	<p>Variabel:</p> <p>Independen: Migrasi domestik, migrasi internasional.</p> <p>Kontrol: Tingkat pengangguran, TPAK, pendapatan rumah tangga dan pendidikan.</p> <p>Dependen: Tingkat Kriminalitas Properti dan Kriminalitas Kekerasan.</p>	<p>Migrasi domestik dan tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kriminalitas properti dan kekerasan, migrasi internasional dan TPAK tidak berpengaruh terhadap kriminalitas properti dan pembunuhan, pendapatan rumah tangga</p>

No	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil
			Alat Analisis: Data panel dengan model terpilih FEM.	berpengaruh negatif terhadap kriminalitas properti namun tidak signifikan terhadap kriminalitas kekerasan, pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kriminalitas properti dan kekerasan.
12.	Sungil Han, Alex R. Piquero	<i>Is It Dangerous to Live in Neighborhoods with More Immigrants? Assessing the Effect of Immigrant Concentration on Crime Patterns</i>	Variabel: Independen: Konsentrasi imigran (utama); persentase laki laki usia 16-24 tahun. Dependen: Jumlah Kasus Kriminalitas Pembunuhan, Kriminalitas Properti dan Kriminalitas Total. Alat Analisis: Regresi Binomial	Variabel migrasi berhubungan negatif signifikan terhadap kriminalitas properti dan total tetapi tidak signifikan terhadap kriminalitas pembunuhan, penduduk usia laki-laki tidak berpengaruh signifikan terhadap semua jenis kriminalitas.
13.	Javier Ramos, Allison G. Kondrat, Jonathan C. Reid (2025)	<i>Bad Hombres or Buena Gente (Bad Man or Good People): Immigration, Nationality and Crime in Texas, 2000 to 2019</i>	Variabel: Independen: Persentasi imigran. Dependen: Tingkat Kriminalitas Kekerasan, Tingkat Kriminalitas Properti dan Tingkat Kriminalitas Narkotika.	Migrasi tidak memiliki hubungan terhadap kriminalitas kekerasan, memiliki hubungan negatif terhadap kriminalitas properti dan memiliki hubungan negatif terhadap

No	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil
			Alat Analisis: Data panel dengan model terpilih FEM.	ke kriminalitas narkotika.

Sumber: Diolah Penulis (2025)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor sosial ekonomi yaitu Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pengangguran, Kepadatan Penduduk, Migrasi Masuk Antarprovinsi, serta efek moderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi pada pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di dua Pulau berbeda yaitu Pulau Jawa dan Sumatera periode tahun 2015-2024. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji terkait variabel-variabel tersebut terhadap kriminalitas, namun sebagian besar penelitian di Indonesia hanya menggunakan kriminalitas agregat yang mungkin saja bukan berasal dari faktor sosial ekonomi. Penelitian ini ingin mengkaji fokus lebih dalam dengan menggunakan kriminalitas properti sebagai tindak kriminalitas yang lahir dari keputusan rasional dan tekanan sosial ekonomi. Penggunaan variabel migrasi masuk antarprovinsi serta perannya dalam memoderasi pengaruh tingkat pengangguran menambah nilai teoritis dengan memperluas pemahaman mengenai bagaimana mobilitas penduduk dan respons pasar tenaga kerja dapat memengaruhi kriminalitas properti. Selain itu, penelitian ini juga hadir untuk melihat analisis komparatif antar dua wilayah dan ingin melihat apakah ada perbedaan pengaruh jika dua wilayah memiliki perbedaan kondisi struktur sosial dan ekonomi yang mana sejauh pengetahuan penulis belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang penting untuk merancang strategi pencegahan kriminalitas properti untuk Pulau Jawa dan Sumatera.

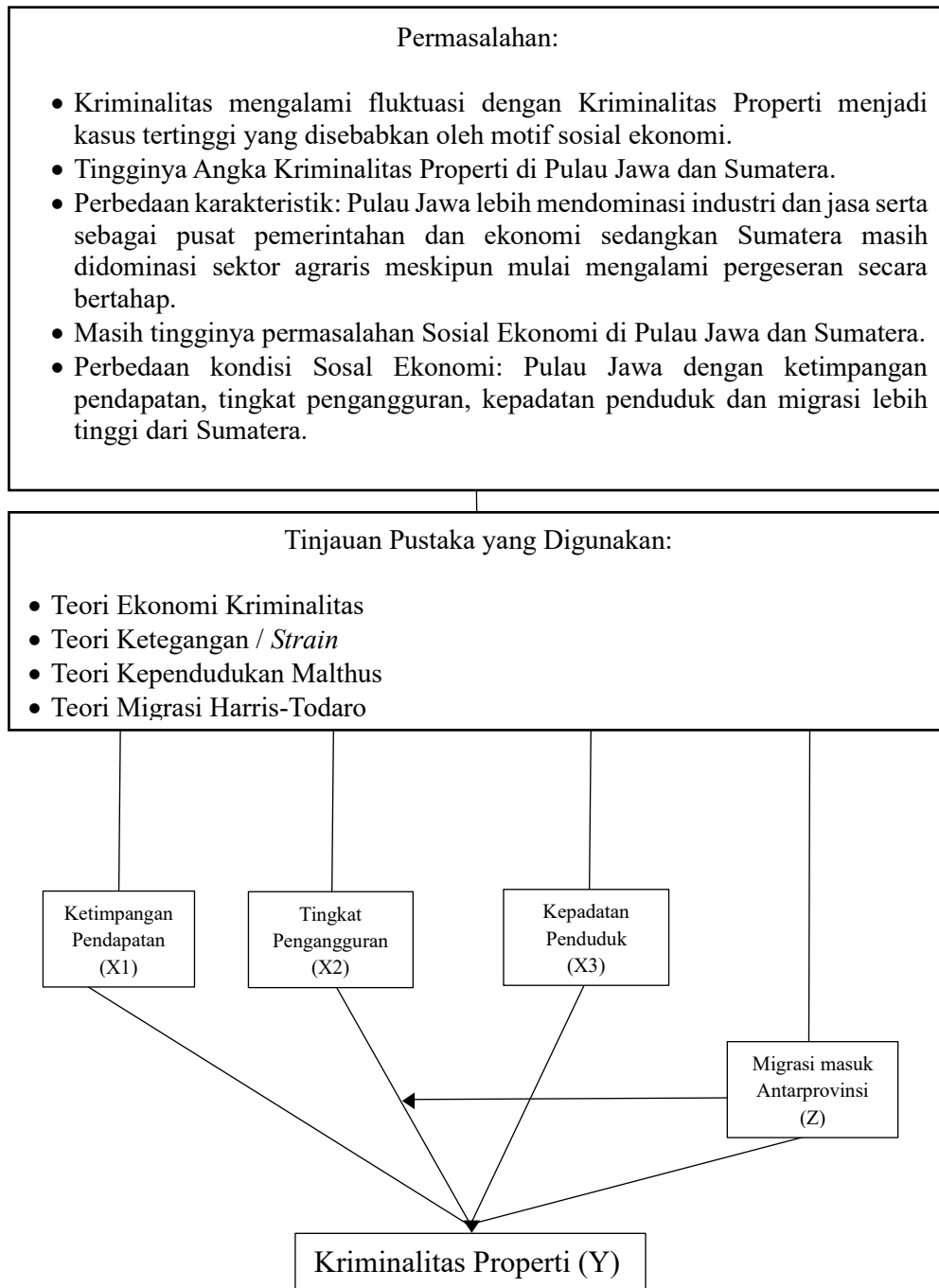
2.3. Kerangka Pemikiran

Ketimpangan pendapatan mencerminkan sejauh mana distribusi kesejahteraan dalam masyarakat tidak merata. Ketika kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah semakin lebar, hal ini dapat menimbulkan ketegangan sosial dan ekonomi yang berujung pada meningkatnya risiko

kriminalitas, khususnya kriminalitas properti. Selain itu, tingkat pengangguran juga dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi suatu wilayah. Pengangguran yang tinggi menandakan banyak individu kehilangan sumber pendapatan dan kesempatan ekonomi legal yang dapat meningkatkan tekanan dalam masyarakat. Berdasarkan pendekatan rasional ekonomi, individu yang tidak memiliki pekerjaan melihat kriminalitas sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian, kepadatan penduduk yang tinggi sering kali diiringi dengan meningkatnya tekanan terhadap sumber daya dan fasilitas publik. Kondisi ini dapat memicu berbagai masalah sosial, termasuk kriminalitas properti, karena meningkatnya persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan tingginya kesempatan melakukan kriminalitas properti di wilayah yang padat. Berdasarkan pandangan teori kependudukan Malthus, pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan ketersediaan sumber daya akan menimbulkan konflik sosial.

Kemudian, masuknya migrasi ke suatu wilayah juga dapat memengaruhi kondisi sosial ekonomi yang beragam, migrasi dapat menurunkan kriminalitas apabila imigran memunculkan lebih banyak aktivitas ekonomi, dukungan sosial dan kontrol sosial yang kuat. Selain itu, ketika individu yang berpindah terserap dalam pasar kerja secara produktif, maka migrasi justru dapat meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi kriminalitas. Namun, migrasi juga dapat meningkatkan kriminalitas apabila imigran tidak dapat menyesuaikan diri, tidak terserap pasar kerja, terjebak dalam ketegangan, layanan publik yang kurang memadai dan melemahnya kohesi sosial. Kemudian, selain berpengaruh secara langsung terhadap kriminalitas properti, pengaruh tingkat pengangguran terhadap kriminalitas properti juga diduga dipengaruhi oleh migrasi masuk antarprovinsi. Daerah yang menerima arus migrasi tinggi cenderung mengalami dinamika sosial ekonomi yang berbeda dibandingkan daerah dengan arus migrasi yang lebih rendah. Pergerakan penduduk antarwilayah dapat memengaruhi kondisi pasar tenaga kerja, aktivitas ekonomi, serta interaksi sosial di wilayah tujuan. Perbedaan kondisi tersebut memungkinkan hubungan antara tingkat pengangguran dan kriminalitas properti bergantung pada kondisi migrasi masuk antarprovinsi.

Berdasarkan fenomena yang diangkat, teori dan literatur penelitian yang telah dikemukakan mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, maka dikembangkan kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut.



Sumber: Diolah Penulis (2026).

Gambar 8. Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, tinjauan pustaka yang digunakan, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis penelitian yang diperoleh yaitu sebagai berikut.

1. Diduga Ketimpangan Pendapatan berpengaruh positif terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera pada tahun 2015-2024 dengan pengaruhnya lebih besar di Pulau Jawa dibandingkan Sumatera.
2. Diduga Tingkat Pengangguran berpengaruh positif terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera pada tahun 2015-2024 dengan pengaruhnya lebih besar di Pulau Jawa dibandingkan Sumatera.
3. Diduga Kepadatan Penduduk berpengaruh positif terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera pada tahun 2015-2024 dengan pengaruhnya lebih besar di Pulau Jawa dibandingkan Sumatera.
4. Diduga Migrasi Masuk Antarprovinsi berpengaruh terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera pada tahun 2015-2024 dengan pengaruhnya lebih besar di Pulau Jawa dibandingkan Sumatera.
5. Diduga Migrasi Masuk Antarprovinsi memoderasi pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera pada tahun 2015–2024, dengan efek moderasi yang lebih besar di Pulau Jawa dibandingkan Sumatera.
6. Diduga secara bersama-sama, Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kepadatan Penduduk, Migrasi Masuk Antarprovinsi, serta efek moderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi pada pengaruh Tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera pada tahun 2015–2024.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Data dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan analisis komparatif. Menurut Tude dkk (2022), analisis komparatif adalah analisis untuk membandingkan dua atau lebih kelompok atau penelitian. Dalam penelitian ini, analisis komparatif digunakan untuk melihat perbandingan pengaruh pada dua wilayah. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, terdiri dari 6 Provinsi di Pulau Jawa dan 10 Provinsi di Pulau Sumatera periode 2015-2024. Sumber data untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. Variabel dan Sumber Data

Variabel	Simbol	Satuan	Sumber Data
Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti	JKP	Jumlah Kasus	Publikasi Statistik Kriminal BPS
Ketimpangan Pendapatan	Gini	Rasio 0-1	Badan Pusat Statistik
Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT	Persentase	Badan Pusat Statistik
Kepadatan Penduduk	KP	Jiwa/KM ²	Badan Pusat Statistik
Migrasi Penduduk Masuk Antarprovinsi	Migrasi	Jumlah Penduduk	Publikasi Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja BPS
Tingkat Pengangguran Terbuka Dimoderasi Migrasi Penduduk Antarprovinsi	TPT* Migrasi	Hasil Perkalian TPT dan Migrasi	Diolah, Sumber Data Asli dari Badan Pusat Statistik

Sumber: Diolah Penulis (2025).

3.2. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

3.2.1. Variabel Dependen (Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti)

Kriminalitas properti adalah bentuk kriminalitas yang menyerang hak kepemilikan atas harta benda (Anggrayni, 2022). Dalam laporan BPS, kriminalitas atas hak milik

terdiri dari dua kategori yaitu dengan kekerasan dan tanpa kekerasan. Dalam KUHP 2023 pasal 479 disebutkan bahwa segala bentuk kriminalitas yang tujuan utamanya menyerang hak milik atau harta benda tetap disebut kriminalitas terhadap harta kekayaan. Jadi, menurut hukum Indonesia, kriminalitas hak milik baik dengan kekerasan atau tanpa kekerasan tetap dianggap sebagai kriminalitas properti karena objek utamanya adalah harta benda. Data jumlah kasus kejadian kriminalitas properti didapatkan dari publikasi rutin tahunan Statistik Kriminal tahun 2016-2025 untuk mendapatkan data periode 2015-2024.

3.2.2. Variabel Independen

a. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan diukur melalui rasio gini. Nilai rasio gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan pemerataan sempurna (semua orang memiliki pendapatan yang sama) dan 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (seluruh pendapatan dimiliki oleh satu orang atau kelompok). Data rasio gini dalam penelitian ini diambil dari BPS mencakup tahun 2015-2024.

b. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menunjukkan persentase penduduk yang tidak bekerja namun aktif mencari pekerjaan dibandingkan dengan total angkatan kerja. Data dalam penelitian ini diperoleh dari BPS dengan satuan persen periode tahun 2015-2024.

c. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk menggambarkan jumlah penduduk yang menempati suatu daerah dalam setiap satuan luas wilayah, dinyatakan dalam jiwa per kilometer persegi (jiwa/km^2). Nilai ini digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat tekanan penduduk terhadap sumber daya serta infrastruktur di suatu wilayah. Data dalam penelitian ini diperoleh dari BPS dengan periode tahun 2015-2024.

d. Migrasi Masuk Antarprovinsi

Migrasi dalam penelitian ini menggambarkan mobilitas masyarakat yang dinyatakan dengan jumlah penduduk yang melakukan pindah masuk ke dalam provinsi dengan melintasi batas administratif provinsi. Seseorang dikatakan sebagai migran internal apabila tempat tinggal pada saat pendataan berbeda dari tempat tinggal sebelumnya atau tempat lahirnya berdasarkan batas administratif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi statistik mobilitas penduduk dan tenaga kerja yang diterbitkan BPS.

e. Tingkat Pengangguran yang Dimoderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi

Variabel Tingkat Pengangguran yang Dimoderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi merupakan hasil perkalian antara variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan variabel Migrasi Masuk Antarprovinsi (Migrasi). Variabel ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah migrasi masuk antarprovinsi dapat memoderasi (menguatkan/melemahkan) pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap kriminalitas properti. Data variabel ini diperoleh dari hasil perkalian data Tingkat Pengangguran Terbuka dan Migrasi Masuk Antarprovinsi pada masing-masing provinsi dan tahun pengamatan.

3.3. Metode Analisis

3.3.1. Model Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis statistik deskriptif kuantitatif data panel dengan metode estimasi regresi menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)*. Proses pengolahan data akan dilakukan dengan bantuan aplikasi misalnya Eviews 12 sebagai alat analisis. Regresi data panel merupakan metode yang mengombinasikan data *time series* dan *cross section*. Menurut Widarjono (2018), penggunaan regresi data panel memiliki beberapa keunggulan dibandingkan data *time series* atau *cross section* saja, yaitu:

- a. Kombinasi kedua jenis data tersebut menghasilkan jumlah data yang lebih banyak sehingga meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*).
- b. Penggabungan informasi dari data *time series* dan *cross section* juga membantu mengurangi bias akibat penghilangan variabel (*omitted variable*).

Dalam penelitian ini akan dilakukan regresi terpisah untuk dua wilayah yaitu Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kemudian, hasil dan koefisien regresi akan dibandingkan untuk melihat apakah terdapat perbedaan hasil antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera serta apabila keduanya berpengaruh, apakah pengaruh di Jawa lebih besar dibandingkan Sumatera atau tidak. Model persamaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Model Persamaan 1 (Pulau Jawa):

$$JKPJawa_{it} = \beta_0 + \beta_1 Gini_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 KP_{it} + \beta_4 Migrasi_{it} + \beta_5 (TPT * Migrasi)_{it} \varepsilon_{it}$$

Model Persamaan 2 (Pulau Sumatera):

$$JKPSumatera_{it} = \beta_0 + \beta_1 Gini_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 KP_{it} + \beta_4 Migrasi_{it} + \beta_5 (TPT * Migrasi)_{it} \varepsilon_{it}$$

Di mana:

JKP = Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti

Gini = Ketimpangan Pendapatan

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

KP = Kepadatan Penduduk

Migrasi = Migrasi Masuk Antarprovinsi

*TPT*Migrasi* = Tingkat Pengangguran Terbuka Dimoderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$ = Koefisien Regresi

i = Banyaknya Provinsi

t = Banyaknya Tahun

ε = Galat Error

Namun, untuk menstabilkan varians, mengurangi pengaruh outlier dan mengurangi masalah dalam uji asumsi klasik digunakan transformasi ke bentuk logaritma untuk data yang berbentuk jumlah yaitu JKP dan Migrasi. Penelitian tentang kriminalitas sebelumnya milik Anggrayni (2022), Asante & Bartha (2022), Ikhsan & Amri (2023), Coccia et al. (2024) dan Septriani (2024) juga menggunakan model

transformasi data log linear tersebut. Berikut ini bentuk model persamaan setelah dilakukan transformasi ke dalam bentuk logaritma.

Model Persamaan 1 (Pulau Jawa):

$$\ln JKP_{Jawa_{it}} = \beta_0 + \beta_1 Gini_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 KP_{it} + \beta_4 \ln Migrasi_{it} + \beta_5 (TPT * \ln Migrasi)_{it} \varepsilon_{it}$$

Model Persamaan 2 (Pulau Sumatera):

$$\ln JKP_{Sumatera_{it}} = \beta_0 + \beta_1 Gini_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 KP_{it} + \beta_4 \ln Migrasi_{it} + \beta_5 (TPT * \ln Migrasi)_{it} \varepsilon_{it}$$

Di mana:

<i>lnJKP</i>	= Logaritma Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti
<i>Gini</i>	= Ketimpangan Pendapatan
<i>TPT</i>	= Tingkat Pengangguran Terbuka
<i>KP</i>	= Kepadatan Penduduk
<i>lnMigrasi</i>	= Logaritma Migrasi Masuk Antarprovinsi
<i>TPT*lnMigrasi</i>	= Tingkat Pengangguran Terbuka Dimoderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$	= Koefisien Regresi
<i>i</i>	= Banyaknya Provinsi
<i>t</i>	= Banyaknya Tahun
ε	= Galat Error

Pendekatan regresi terpisah untuk analisis komparatif dilakukan agar estimasi koefisien menjadi lebih stabil dan representatif terhadap karakteristik masing-masing wilayah. Dalam penelitian sebelumnya, Kurniawan & Ihsan (2021) juga menggunakan regresi terpisah untuk menganalisis perbedaan pengaruh infrastruktur dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa.

3.4. Teknik Analisis Data

3.4.1. Metode Regresi Data Panel

Dalam data panel, terdapat tiga model estimasi yang harus dipilih untuk digunakan sehingga model sesuai dengan karakteristik data (Widarjono, 2018).

A. Metode *Common Effect Model* (CEM)

Pendekatan dengan metode CEM merupakan teknik paling sederhana untuk mengestimasi data panel yaitu dengan menggunakan kombinasi dari *time series* dan *cross section* tanpa melihat sisi perbedaan antarwaktu dan antarindividu. Dalam model ini, data antar waktu dan individu diasumsikan sama.

B. Metode *Fixed Effect Model* (FEM)

Pendekatan dengan model FEM mengestimasi data panel dengan adanya asumsi bahwa ada perbedaan intersep dalam data dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkapnya. Dimana variabel *dummy* memiliki nilai 0 artinya tidak terdapat pengaruh sedangkan nilai 1 artinya variabel memiliki pengaruh. Model estimasi ini disebut juga dengan *Least Squares Dummy Variabels (LSDV)*.

C. Metode *Random Effect Model* (REM)

Pendekatan dengan model REM mengestimasi data panel dengan variabel gangguan yang mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu yang disebabkan karena berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang disebabkan penggunaan variabel pada pendekatan FEM.

3.4.2. Pemilihan Metode Regresi Data Panel

Pemilihan metode regresi data panel bertujuan untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai diantara tiga model di atas, sehingga model yang dipilih diharapkan mampu memberikan estimasi yang paling efisien. Untuk memilih model yang tepat, dilakukan beberapa uji berikut (Widarjono, 2018).

A. Uji *Chow*

Uji *Chow* adalah metode statistik untuk menentukan apakah model regresi data panel sebaiknya diestimasi menggunakan model CEM atau model FEM. Tujuan utama dari uji ini adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara intersep pada masing-masing individu dalam data panel. Berikut hipotesis yang digunakan dalam uji *chow*.

H_0 : Probabilitas *Cross-section* $F > \alpha$ (0,05) maka model terpilih adalah CEM.

H_a : Probabilitas *Cross-section* $F < \alpha$ (0,05), maka model terpilih adalah FEM.

B. Uji Hausman

Uji Hausman adalah metode statistik untuk menentukan apakah model regresi data panel sebaiknya diestimasi menggunakan FEM atau REM. Tujuan utama dari uji ini adalah untuk melihat apakah perbedaan antara kedua model tersebut signifikan, khususnya apakah efek individual (*cross-section effect*) berkorelasi dengan variabel independen dalam model. Berikut hipotesis yang digunakan dalam uji Hausman.

H_0 : Probabilitas *Cross-section random* $> \alpha$ (0,05), maka model terpilih adalah REM.

H_a : Probabilitas *Cross-section random* $< \alpha$ (0,05), maka model terpilih adalah FEM.

C. Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah model regresi data panel sebaiknya diestimasi menggunakan REM atau CEM. Tujuan utama dari uji LM adalah untuk melihat apakah adanya perbedaan yang signifikan antara variansi error komponen individu (*cross-section*) dengan nol, yang menunjukkan bahwa efek acak memang relevan dalam model.

H_0 : Probabilitas *Cross-section Breusch-pagan* $> \alpha$ (0,05), maka model terpilih CEM.

H_a : Probabilitas *Cross-section Breusch-pagan* $< \alpha$ (0,05), maka model terpilih REM.

3.4.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa hasil dari model regresi data panel yang diperoleh bersifat valid dan dapat dipercaya (Widarjono, 2018).

A. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Distribusi normal pada residual menunjukkan bahwa model regresi telah menghasilkan estimasi yang tidak bias dan dapat diandalkan. Uji normalitas biasanya dilakukan menggunakan uji *Jarque-Bera* (JB) dengan kriteria berikut.

- a. Jika probabilitas $>$ dari α (0,05), maka data berdistribusi normal.
- b. Jika Probabilitas $<$ dari α (0,05), maka data tidak berdistribusi normal.

B. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Adanya multikolinearitas dapat menyebabkan hasil estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil, memiliki standar error yang besar, serta menurunkan keakuratan interpretasi model. Uji multikolinearitas juga dapat dilakukan dengan *Uji Variance Inflation Factor* (VIF) dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Jika $VIF < 10$ maka model lolos dari masalah multikolinearitas.
- b. Jika $VIF > 10$ maka model terindikasi adanya masalah multikolinearitas.

C. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah varians dari residual (*error term*) dalam model regresi bersifat konstan atau tidak. Jika terjadi heteroskedastisitas, artinya varians residual berbeda-beda antar observasi, sehingga dapat menyebabkan estimasi koefisien menjadi tidak efisien dan hasil uji statistik menjadi tidak valid. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *Glejser*.

- a. Jika probabilitas $>$ dari α (0,05), maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.
- b. Jika probabilitas $<$ dari α (0,05), maka terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model.

D. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi antara residual pada satu periode dengan residual pada periode sebelumnya dalam model regresi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa galat (residual) bersifat independen antar waktu, sesuai dengan asumsi klasik regresi. Jika terjadi autokorelasi, maka residual tidak acak dan menunjukkan adanya pola tertentu, yang dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi bias. Dalam analisis data panel, uji autokorelasi biasanya dilakukan menggunakan uji *Durbin-Watson (DW)* dengan kriteria penilaian sebagai berikut.

$DW \approx 2 \rightarrow$ Tidak ada autokorelasi.

$DW \approx 0 \rightarrow$ Terdapat autokorelasi positif.

$DW \approx 4 \rightarrow$ Terdapat autokorelasi negatif.

3.4.4. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menentukan apakah dugaan atau pernyataan awal (hipotesis) tentang hubungan antar variabel dalam suatu penelitian dapat diterima atau harus ditolak berdasarkan data yang diperoleh (Widarjono, 2018).

A. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dalam model regresi, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah koefisien regresi setiap variabel bebas (β_i) signifikan secara statistik atau tidak. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t *hitung* terhadap t *tabel* dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Jika t -statistik $>$ t -tabel, maka H_0 ditolak, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika t -statistik $<$ t -tabel, maka H_0 diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk hipotesis parsial dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Ketimpangan Pendapatan

$H_{01}: \beta_1 = 0$, Ketimpangan Pendapatan tidak berpengaruh terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

$H_{a1}: \beta_1 > 0$, Ketimpangan Pendapatan berpengaruh positif terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

2. Tingkat Pengangguran

$H_{02}: \beta_2 = 0$, Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

$H_{a2}: \beta_2 > 0$, Tingkat Pengangguran berpengaruh positif terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

3. Kepadatan Penduduk

$H_{03}: \beta_3 = 0$, Kepadatan Penduduk tidak berpengaruh terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

$H_{a3}: \beta_3 > 0$, Kepadatan Penduduk berpengaruh positif terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

4. Migrasi Masuk Antarprovinsi

$H_{04}: \beta_4 = 0$, Migrasi Masuk Antarprovinsi tidak berpengaruh terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

$H_{a4}: \beta_4 \neq 0$, Migrasi Masuk Antarprovinsi berpengaruh terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka Dimoderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi

$H_{05}: \beta_5 = 0$, Migrasi Masuk Antarprovinsi tidak dapat memoderasi (menguatkan/melemahkan) pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

$H_{a5}: \beta_5 \neq 0$, Migrasi Masuk Antarprovinsi dapat memoderasi (menguatkan/melemahkan) pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

B. Uji Bersama-sama (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk menguji signifikansi model regresi secara keseluruhan. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas $F \leq 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Sebaliknya, jika nilai probabilitas $F > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini, hipotesis uji-f adalah sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$, Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pengangguran, Kepadatan Penduduk, Migrasi Masuk Antarprovinsi dan efek moderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi pada pengaruh Tingkat Pengangguran secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

$H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$, Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pengangguran, Kepadatan Penduduk, Migrasi Masuk Antarprovinsi dan efek moderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi pada pengaruh Tingkat Pengangguran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

3.4.5. Analisis Komparatif

Untuk analisis komparatif dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi pada persamaan 1 dan persamaan 2. Apabila keduanya berpengaruh signifikan, maka dilakukan analisis untuk melihat apakah pengaruh di Jawa lebih besar daripada di Sumatera dengan analisis sebagai berikut.

1. Ketimpangan Pendapatan

Analisis komparatif dilakukan untuk melihat apakah Ketimpangan Pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti baik di Pulau Jawa maupun Sumatera. Selanjutnya, apabila pengaruh positif tersebut ditemukan pada kedua wilayah, maka dilakukan perbandingan untuk mengetahui benarkah besarnya pengaruh di Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan di Pulau Sumatera ($\beta_{1Jawa} > \beta_{1Sumatera}$). Namun, apabila hasil atau arah pengaruhnya berbeda, maka interpretasi difokuskan pada hasil di setiap wilayah, tanpa melakukan perbandingan besaran pengaruh.

2. Tingkat Pengangguran

Analisis komparatif dilakukan untuk melihat apakah Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti baik di Pulau Jawa maupun Sumatera. Selanjutnya, apabila pengaruh positif tersebut ditemukan pada kedua wilayah, maka dilakukan perbandingan untuk mengetahui benarkah besarnya pengaruh di Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan di Pulau Sumatera ($\beta_{2Jawa} > \beta_{2Sumatera}$). Namun, apabila hasil atau arah pengaruhnya berbeda, maka interpretasi difokuskan pada hasil di setiap wilayah, tanpa melakukan perbandingan besaran pengaruh.

3. Kepadatan Penduduk

Analisis komparatif dilakukan untuk melihat apakah Kepadatan Penduduk memiliki pengaruh positif terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti baik di Pulau Jawa maupun Sumatera. Selanjutnya, apabila pengaruh positif tersebut ditemukan pada kedua wilayah, maka dilakukan perbandingan untuk mengetahui benarkah besarnya pengaruh di Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan di Pulau Sumatera ($\beta_{3Jawa} > \beta_{3Sumatera}$). Namun, apabila hasil atau arah pengaruhnya berbeda, maka interpretasi difokuskan pada hasil di setiap wilayah, tanpa melakukan perbandingan besaran pengaruh.

4. Migrasi Masuk Antarprovinsi

Analisis komparatif dilakukan untuk melihat apakah Migrasi Masuk Antarprovinsi memiliki pengaruh terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti baik di Pulau Jawa maupun Sumatera. Selanjutnya, apabila pengaruh yang sama ditemukan pada kedua wilayah, maka dilakukan perbandingan untuk

mengetahui benarkah besarnya pengaruh di Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan di Pulau Sumatera ($\beta_{4\text{Jawa}} > \beta_{4\text{Sumatera}}$). Namun, apabila hasil atau arah pengaruhnya berbeda, maka interpretasi difokuskan pada hasil di setiap wilayah, tanpa melakukan perbandingan besaran pengaruh.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka Dimoderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi

Analisis komparatif dilakukan untuk melihat apakah Migrasi Masuk Antarprovinsi memoderasi pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti baik di Pulau Jawa maupun Sumatera. Selanjutnya, apabila efek moderasi yang dihasilkan memiliki arah pengaruh yang sama pada kedua wilayah, maka dilakukan perbandingan untuk mengetahui apakah besarnya efek moderasi di Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan di Pulau Sumatera ($\beta_{5\text{Jawa}} > \beta_{5\text{Sumatera}}$). Namun, apabila arah atau hasil pengaruhnya berbeda, maka interpretasi difokuskan pada hasil masing-masing wilayah tanpa melakukan perbandingan besaran pengaruh.

3.4.6. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam suatu model regresi. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai mendekati 1 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sebagian besar variasi variabel dependen secara akurat. Sebaliknya, nilai mendekati 0 menunjukkan bahwa model kurang efektif dalam menjelaskan variasi tersebut.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Ketimpangan Pendapatan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah kasus kejadian kriminalitas properti baik di Pulau Jawa maupun Pulau Sumatera. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pajak bagi penduduk menengah atas serta keberadaan program perlindungan sosial bagi penduduk kurang mampu. Dalam beberapa penelitian, ketimpangan pendapatan lebih berpotensi memicu bentuk kriminalitas lainnya seperti kekerasan dan konflik sosial dibandingkan kriminalitas properti secara langsung.
2. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap kasus kejadian kriminalitas properti di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera selama periode 2015–2024. Meningkatnya pengangguran menyebabkan tekanan ekonomi dan berkurangnya peluang memperoleh pendapatan secara legal, sehingga dapat mendorong sebagian individu melakukan kriminalitas properti sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan. Pengaruh tersebut ditemukan lebih kuat di Pulau Jawa dibandingkan Pulau Sumatera, yang menunjukkan bahwa tekanan ekonomi akibat pengangguran di Pulau Jawa relatif lebih besar.
3. Kepadatan Penduduk menunjukkan perbedaan hasil untuk kedua wilayah. Di Pulau Sumatera, kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas properti yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya, infrastruktur, dan peluang ekonomi dapat menimbulkan tekanan sosial dan persaingan yang mendorong terjadinya kriminalitas. Sebaliknya, di Pulau Jawa, meskipun memiliki kepadatan penduduk tinggi, namun hasilnya tidak

berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas properti. Hal ini dapat terjadi karena kemampuan adaptasi yang terjadi, dukungan infrastruktur yang relatif lebih memadai, serta penguatan kontrol sosial di masyarakat.

4. Migrasi Masuk Antarprovinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kasus kejadian kriminalitas properti di Pulau Jawa maupun Pulau Sumatera selama periode 2015–2024. Peningkatan jumlah migran tidak secara otomatis menyebabkan peningkatan kriminalitas properti karena sebagian besar migran berpindah dengan tujuan memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan adanya peluang ekonomi dan kesempatan kerja yang memadai di daerah tujuan, migran cenderung memilih beradaptasi serta mencapai keberhasilan melalui cara-cara yang legal, sehingga hubungan antara migrasi dan kriminalitas properti lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan pasar kerja dibandingkan oleh keberadaan migran itu sendiri.
5. Migrasi Masuk Antarprovinsi terbukti memoderasi pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kriminalitas properti di Pulau Jawa dan Sumatera dengan arah moderasi negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi migrasi masuk antarprovinsi, maka pengaruh positif Tingkat Pengangguran terhadap kriminalitas properti cenderung melemah. Hasil ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian kriminalitas properti perlu difokuskan pada penurunan pengangguran dan peningkatan kesempatan kerja bagi penduduk lokal maupun migran sehingga mobilitas penduduk dapat memberikan kontribusi positif terhadap aktivitas ekonomi tanpa meningkatkan risiko kriminalitas properti. Secara komparatif, efek moderasi tersebut lebih kuat terjadi di Pulau Jawa dibandingkan Pulau Sumatera yang menunjukkan bahwa migrasi masuk di Pulau Jawa.
6. Secara bersama-sama, Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pengangguran, Kepadatan Penduduk, Migrasi Masuk Antarprovinsi, serta Tingkat Pengangguran yang dimoderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi berpengaruh signifikan terhadap jumlah kasus kejadian kriminalitas properti di Pulau Jawa dan Sumatera periode 2015-2024. Temuan ini menunjukkan bahwa kriminalitas properti merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial ekonomi yang digunakan dalam model penelitian, sehingga kebijakan yang

berkaitan pengelolaan pendapatan, pengangguran, kependudukan, dan mobilitas penduduk diperlukan untuk menekan kasus kriminalitas properti.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis merumuskan beberapa saran yang ditujukan bagi pemerintah, pemangku kebijakan, serta peneliti selanjutnya sebagai berikut.

1. Meskipun ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas properti, pemerintah tetap perlu menjaga stabilitas distribusi pendapatan melalui kebijakan yang inklusif. Upaya penguatan program pemerataan pendapatan, perlindungan sosial, subsidi, serta peningkatan akses layanan dasar juga tetap harus ditingkatkan. Hal ini untuk mengantisipasi dampak ketimpangan pendapatan berkembang menjadi bentuk kejahatan baik dalam hal properti maupun ketegangan sosial lain.
2. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menekan tingkat pengangguran. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja, pengembangan program pelatihan dan sertifikasi keterampilan, peningkatan kewirausahaan, serta mendorong investasi pada sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
3. Pemerintah perlu mengelola pertumbuhan penduduk melalui pemerataan pembangunan wilayah, peningkatan infrastruktur, serta penyediaan lapangan kerja yang memadai khususnya di Pulau Sumatera. Sementara itu, di Pulau Jawa, praktik pengelolaan kepadatan yang baik perlu terus ditingkatkan, terutama melalui penguatan sistem keamanan lingkungan, tata ruang yang terencana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Pemerintah perlu memandang migrasi sebagai potensi pembangunan, bukan sebagai beban sosial. Kebijakan yang mendukung integrasi migran, seperti penyediaan akses pekerjaan, pelatihan keterampilan, serta kemudahan akses terhadap layanan publik perlu diperkuat. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa wilayah tujuan migrasi memiliki kapasitas ekonomi dan sosial yang cukup untuk menyerap penduduk baru.

5. Pemerintah Indonesia sebaiknya memperkuat pemerataan pembangunan antarwilayah baik Pulau Jawa dan luar Jawa seperti Sumatera. Upaya pemerataan dapat dilakukan melalui peningkatan infrastruktur, akses layanan dasar, serta penciptaan industri ekonomi baru yang lebih merata.
6. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan mobilitas penduduk antarwilayah diikuti dengan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta dukungan integrasi ekonomi bagi penduduk lokal dan migran. Dengan demikian, arus migrasi dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar tanpa meningkatkan risiko kriminalitas properti.
7. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kriminalitas. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat fokus untuk mencari variabel yang lebih kuat dalam mempengaruhi kriminalitas properti di Pulau Jawa. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan periode penelitian yang lebih panjang atau mempertimbangkan analisis lain baik berbasis wilayah seperti analisis spasial atau alat analisis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abramitzky, R., Boustan, L. P., Jacome, E., Santiago, P., & Torres, J. D. (2024). Law-Abiding Immigrants: The Incarceration Gap Between Immigrants and The US-Born, 1870-2020. *National Bureau of Economic Research*, K4(N31). <https://doi.org/http://www.nber.org/data-appendix/w31440>
- Ahmad, A., Masron, T., Syakinah, A., Ali, M., Kimura, Y., Syahrul, & Junaini, N. (2024). Demographic Dynamics and Urban Property Crime: A Linear Regression Analysis in Kuala Lumpur and Putrajaya (2015-2020). *Journal of the Malaysian Institute of Planners*, 22(4), 303–319.
- Al Farrell, I. M., & Atmanti Hastarini Dwi. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Upah, Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran (Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia). *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)*, VI(2), 128–138.
- Amilia, D., & Ridwan, P. (2024). Analisis Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5, 1693–1706.
- Andressony, D. (2024). Analisis Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Kemiskinan, dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas di Provinsi Kalimantan Tengah. *Borjuis: Journal of Economy*, 1(3), 101–115.
- Anfasha, A. M., Sambodo, H., & Rosiana, M. (2024). Determinan Migrasi Masuk Risen di Jawa dan Sumatera Era 2005-2020. *Forum Ekonomi Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 26(4), 808–817.
- Anggrayni, A. S. (2022). The Effect of Economic Factors on Property Crime Rates. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 5(2), 123–131. <https://doi.org/10.15294/efficient.v5i2.51036>
- Anozi, D. T., & Novianda, B. (2023). Socio-Economic and Property Crime Rate in Indonesia. *Economics Development Analysis Journal Vol*, 12(3). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Apel, R. (2026). Can Social Safety Net Spending Prevent Crime? *Annual Review of Criminology*, 9, 101–125. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-032924>

- Arif, A. F. N., & Nurwati, N. (2022). Pengaruh Konsentrasi Penduduk Indonesia di Pulau Jawa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" Fisip Unpas*, IV(1), 54–70.
- Asante, G., & Bartha, A. (2022). The Positive Externality of Education on Crime: Insights from Sub-Saharan Africa. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 1–24. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2038850>
- Awaludin, M., Maryam, S., & Firmansyah, M. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Konstanta Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 156–174.
- Bangun, R. H. (2021). Optimalisasi Sektor Pertanian Dalam Rangka Mengatasi Pengangguran Di Sumatera Utara. *Jurnal Agriuma*, 3(2), 60–65. <https://doi.org/10.31289/agri.v3i2.5689>
- Barika, Ekaputri, R. A., & Efendi. (2021). Analisis Struktur Ekonomi di Sumatera. *PARETO : Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 35–48.
- Basuki, A. T. (2019). *Buku Praktikum EViews Program Studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Rajawali Pers.
- Becker, G. S. (1968). *Crime and Punishment: An Economic Approach*.
- BPS. (2023). *Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi*. <https://www.bps.go.id/id>.
- BPS. (2023). *Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas (Tahun), 2024*. <https://www.bps.go.id/>.
- BPS. (2023). *Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)*. <https://www.bps.go.id/>.
- BPS. (2024). *Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi, 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/>.
- BPS. (2024). *Statistik Kriminal*.
- BPS. (2024). *Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja*.
- BPS. (2025). *Statistik Kriminal 2024-2025*.
- Case, Fair, & Oster. (2021). *Prinsip-Prinsip Ekonomi*.

- Coccia, M., Cohn, E. G., & Kakar, S. (2024). How Immigration, Level of Unemployment, and Income Inequality Affect Crime in Europe. *Crime, Law and Social Change*, 82(2), 363–385. <https://doi.org/10.1007/s10611-024-10144-y>
- Desmawan, D., Fitrianovaline, A., Latuconsina, A. D., Siregar, M. N., Ramdani, M. N., & Fauzan, M. (2023). Analisis Laju Petumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan Provinsi Banten 2017-2019. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(2), 554–558.
- Domini, G., & Sitorus, Y. A. (2025). Studi Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten dan DKI Jakarta dengan Pendekatan Uji Mann-Whitney U. *Jurnal Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 7(1). <https://doi.org/10.8734/trigo.v1i2.365>
- Egger, E.-M. (2022). Internal Migration and Crime in Brazil. *Economic Development and Cultural Change*, 71(1). <https://doi.org/10.7910/DVN/KXIVXX>
- Fauzan, M., Amalia, F., Ali, H., & Hutajulu, H. (2023). The Relationship between Income Inequality, Economic Growth, Inflation, and Unemployment in West Java Province. In *West Science Business and Management* (Vol. 1, Number 02).
- Febbyanto, D. R., Komariyah, S., & Adennan, Moh. (2026). Analisis Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas di Indonesia. *Independent Economic Journal (IEJ)*, 1(2).
- Ganbold, D., Jamsranjav, E., Kim, Y. R., & Jargalsaikhan, E. (2025). Economic Clues to Crime: Insights from Mongolia. *Economies*, 13(6). <https://doi.org/10.3390/economies13060160>
- Global Initiative. (2025). *Global Organized Crime Index 2025 Crime at a Crossroads*. www.globalinitiative.net
- Hadi, H., Yuliana, E., Faturahim, A., & Ariyantini, M. (2024). How Do Poverty and Inequality Impact the Economic Growth in South Sumatra? *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i18.16326>
- Han, S., & Piquero, A. R. (2022). Is It Dangerous to Live in Neighborhoods with More Immigrants? Assessing the Effects of Immigrant Concentration on Crime Patterns. *Crime and Delinquency*, 68(1), 52–79. <https://doi.org/10.1177/00111287211007736>
- Harahap, W. G., Linda Sari, R., & Lubis, I. (2023). Analysis of The Effect of Population Density, Unemployment, Minimum Wage, and Human Development Index (IPM) on Criminality in North Sumatra. *International*

- Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)*, 2(2), 179–192. <https://doi.org/10.54443/sj.v2i2.127>
- Hasisi, B., & Itskovich, E. (2025). Trends in Inequality and Violent Crime: A Comparative Analysis of Majority and Minority Communities. *Journal of Quantitative Criminology*. <https://doi.org/10.1007/s10940-025-09631-9>
- Hasna Tazkiya, N., Cahayu Baitunnisa, N., & Imani Hakam, L. (2025). Peran Transformasi Struktur Ekonomi Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Analisis Literatur Sistematis. *Jurnal Ekonomi : Journal of Economic*, 16, 131–138. <https://doi.org/10.47007/jeko>
- Hjalmarsson, R., Machin, S., & Pinotti, P. (2024). *Crime and the Labor Market*. www.rfberlin.comwww.cream-migration.org
- Ikhsan, I., & Amri, A. (2023). Exploration of Macroeconomic Effects on Criminality in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2206678>
- Itskovich, E. (2025). Economic Inequality, Relative Deprivation, and Crime: An Individual-Level Examination. *Justice Quarterly*, 42(4), 637–658. <https://doi.org/10.1080/07418825.2024.2435859>
- Jahan, B. (2025). Migration and Crime: Does Migration Really Effect on Increasing State Crime? *Essays of Faculty of Law, University of Pecs Yearbook of 2024*, (1). <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.001.0001/acre>
- Krisnandita, I. W., & Sudibia, I. K. (2024). Unveiling the Determinants of High-Skilled Migration in Indonesia: A Gravity Model Approach. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(2), 237–252. <https://doi.org/10.29259/jep.v22i2.23105>
- KUHP. (2023). *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Kurniasih, E. P., Andini, N., Kartika, M., Dosinta, N. F., Hamsyi, N. F., & Iqbal, I. (2024). Unveiling The Links: How Poverty, Unemployment, Education, and Income Inequality Drive Crime in Indonesia? *Journal of Islamic Economics*, 8(2), 189–210. <https://doi.org/10.26740/al>
- Kurniawan, A., & Ihsan, M. (2021). Infrastruktur, Investasi dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Kasus pada Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa). *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 1(2), 78–88. <https://doi.org/222.jrie.feb.unpas.ac.id>
- Lee, C. I. (2008). Migration and The Wage and Unemployment Gaps Between Urban and Non-urban Sectors: A Dynamic General Equilibrium Reinterpretation of The Harris-Todaro Equilibrium. *Labour Economics*, 15(6), 1416–1434. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2008.01.003>

- Maidiansyah, P. (2022). What Influences Unemployment in Aceh Province. *Jurnal Ilmiah Teunuleh The International Journal of Social Sciences*, 3(4).
- Malthus, T. (1798). *An Essay on the Principle of Population*. <http://www.esp.org>
- Manik, S. G. E., Artati, N. N. S., Pradnyani, N. M. D., Nilakusmawati, D. P. E., Harini, L. P. I., Dewi, K. N. A., & Widiastuti, R. S. (2026). The Impact of Internal Migration on Population Growth Inequality between Java and Other Regions of Indonesia: A Literature Study of Indonesian Demographic. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 7(1), 713–723. <https://doi.org/10.54660/IJMRGE.2026.7.1.713-723>
- Mariani, F., & Mercier, M. (2021). Immigration and Crime: The Role of Self-Selection and Institutions Immigration and Crime: The Role of Self-selection and Institutions *. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 1. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.03.011>
- Marie, O., & Pinotti, P. (2024). Immigration and Crime: An International Perspective. *Journal of Economic Perspectives*, 38(1), 181–200. <https://doi.org/10.1257/jep.38.1.181>
- Maya Gita Safitri, Meliana Agustin, Ilham Syahroni, & Erlin Kurniati. (2024). Peran Sektor Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan untuk Pemberdayaan Ekonomi di Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3(1), 195–204. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i1.1158>
- Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. In *Sociological Review* (Vol. 3, Number 5). <https://doi.org/http://links.jstor.org/sici?sici=0003-1224%28193810%293%3A5%3C672%3ASSAA%3E2.0.CO%3B2-8>
- Nadya Soraya, Muhammad Azkia Nurfikri, Ariq Rafi, & Muhammad Kurniawan. (2024). Pengaruh Ketimpangan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2013-2023. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 270–284. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i2.980>
- Nagashima, M. (2018). A Condition for The Reduction of Urban Unemployment in the Harris–Todaro Model. *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 2(1), 243–255. <https://doi.org/10.1007/s41685-018-0070-8>
- Nur, A. S., Juliarto, H. K., Syawal, A. F., & Nohe, D. A. (2022). Analisis Regresi Data Panel Pada Ketimpangan Pendapatan Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, Dan Aplikasinya*, 2, 241–253.
- Nurfadilah, R., & Fathihani. (2025). Pengaruh Debt To Asset Ratio (DAR), Working Capital Turnover (WCT), dan Price Earning Ratio (PER) Terhadap Harga Saham. *Jurnal Ekonomika*45, 12(2), 411–422.

- Odabasi, S. (2021). The Economics of Crime and Immigration: A Panel Data Analysis. *Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute*, 388–397. <https://doi.org/10.30794/pausbed.778218>
- Osaru, F., Mike, A., Author, C., & Asekome, M. (2018). An Empirical Investigation of Impact of Exchange Rate Management on The Growth of Nigerian Economy. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 2(01), 151–159. <https://doi.org/www.ijebmr.com>
- Ozlem, D. (2022). Economic Causes Of Theft In 25 OECD Countries: Dynamic Panel Data Analysis. *In Traders International Trade Academic Journal*, 5, 115–137. <https://doi.org/www.intraders.org>
- Putriana Margaretha Br Sitanggang, M. (2024). The Effect of HDI, Population Density, Poverty, and Income Inequality on Criminality in DKI Jakarta Province. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 12(02), 94–101. <https://doi.org/10.33019/equity.v%0vi%i.390>
- Rahmah, N. F., Kharisma, A. N., Halimatusadiyah, E., Baitul, S., & Al-Islami, A. (2024). Faktor Sosial Ekonomi sebagai Prediktor Perilaku Kriminal. *Intelektiva*, 6(2), 369–375.
- Rajid, E. (2024). Faktor Penentu Tingkat Pengangguran Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5, 4163.
- Rinardi, H., Indrahti, S., & Masruroh, N. N. (2023). Ketimpangan Ekonomi Jawa dan Luar Jawa dan Perkembangan Perdagangan Antarpulau di Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 8(1), 29–43. <https://doi.org/10.14710/jscl.v8i1.54443>
- Rochayati, N. (2025). Analisis Dinamika Penduduk dan Perubahan Komposisi Demografi di Indonesia: Implikasi bagi Perencanaan Pembangunan. *Education, Social Sciences and Linguistics: Conference Series*, 1(2), 106–111. <https://doi.org/https://journal.ummat.ac.id/index.php/ecs>
- Rumaisha, Z., Subanti, S., & Slamet, I. (2025). Analisis Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas Menggunakan Regresi Data Panel di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains*, 3(1), 137–142. <https://prosiding.seminars.id/sainteks>
- Sabiq, R. M., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Tindakan Kriminal. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(2), 161–167.
- Saputra, R. D., & Rambe, R. A. (2025). Applying Keynesian Theory to Identify Determinants of Gross Regional Domestic Product: Comparative Evidence From Java and Sumatra. *Economics, Management and Sustainability*, 10(1), 66–73. <https://doi.org/10.14254/jems.2025.10-1.4>

- Sargent, K. (2024). Unpacking Migration Costs: Heterogeneous Effects in EU Labor Markets. *Economic Modelling*, 139, 106816. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2024.106816>
- Septriani, S. (2024). The Impact of Economic Conditions on Criminality in Indonesia. *European Journal of Development Studies*, 4(3), 68–74. <https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2024.4.3.345>
- Setiabasith, D. (2025). Pola Migrasi Intergenerasi Transmigran Jawa di Lampung: Analisis Karakteristik dan Perkembangan Kehidupan. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 8(2), 236–250. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v8i2.472>
- Shahid, M., Ahmad, K., Inayat, M. A., & Bhatti, M. K. (2024). Socio-Economic Determinants of Property Crime Across the Districts of Punjab: Highlighting the Role of Law Enforcement Agencies of Pakistan. *Bulletin of Business and Economics (BBE)*, 13(2), 22–36. <https://doi.org/10.61506/01.00289>
- Siboro, V. O. (2023). Transformasi Struktur Ekonomi Di Provinsi Di Pulau Jawa. *MABIS*, 14, 171–179.
- Sihombing, L. A., & Utami, C. F. (2023). Hierarki dan Distribusi Kota: Penyebaran, dan Kepadatan Penduduk Serta Implikasinya Terhadap Infrastruktur. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 5(2), 219–229.
- Sinaga, E., Lubis, T. A., Situmorang, E. A., & Harahap, A. S. (2022). Dampak Program Perlindungan Sosial terhadap Kemiskinan di Sumatra Utara. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(2), 116–131. <https://doi.org/10.33105/jmp.v3i2.416>
- Sinaga, H. (2022). Pengaruh Kondisi Sosio-Ekonomi Imigran Terhadap Kegiatan Kriminal di Indonesia. *IBLAM Law Review*, 02(02), 189. <https://doi.org/10.47198/naker.v15i1.43.2020>
- Sitanggang, M. P., & Hutapia. (2024). The Effect of HDI, Population Density, Poverty, and Income Inequality on Criminality in DKI Jakarta Province. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 12(02), 96–101. <https://doi.org/10.33019/equity.v%vi%i.390>
- Tambunan, B. A. Y., Darayani, F., & Harahap, I. (2024). Hubungan Antara Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi Terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk di Indonesia. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(2), 432–441.
- Todaro, Michael P., & Smith, S. C. (2020). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed., Vol. 1). Arrangement with Pearson Education.
- Tri Susanti, S., Ananta, P., Wayan Suparta, I., Murwiati, A., Ekonomi dan Bisnis, F., Lampung, U., & Lampung, B. (2025). Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Kriminalitas Di Indonesia. *Indonesian Journal of Economics*, 2(6).

- Tude, M., Saerang, I. S., & Maramis, J. B. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada PT Garuda Indonesia TBK dan PT Airasia Indonesia TBK Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*, 10(2), 494–501.
- Tulcanaza-Prieto, A. B., Cortez-Ordoñez, A., Rivera, J., & Lee, C. W. (2025). Is Digital Literacy a Moderator Variable in the Relationship Between Financial Literacy, Financial Inclusion, and Financial Well-Being in the Ecuadorian Context? *Sustainability (Switzerland)*, 17(6). <https://doi.org/10.3390/su17062476>
- Urowoli, C. E., & Alero, T. A. (2022). The Nexus among Unemployment, Poverty and Crime in Contemporary Nigeria. *Reality of Politics*, 2022(No. 19(1)), 132–148. <https://doi.org/10.15804/rop2022108>
- Veranita, G., & Yudhistira, M. H. (2022). The Effect of Density on Crime: Evidence from Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 6(3), 292–303. <https://doi.org/10.36574/jpp.v6i3.342>
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews*.
- Wulan Dari, S., & Asnidar. (2022). Pengaruh Kepadatan Penduduk, Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kriminalitas. *Niagawan*, 11, 68–79.
- Yang, J. (2025). Income Equality and Crime Rates in New York State: a County-Level Empirical Analysis. In *Journal of Education, Humanities and Social Sciences BMHEE* (Vol. 2025).
- Yuliana Putri, D., & Aminda, R. S. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Of Development Economic And Digitalization*, 3(1), 87–108.
- Zuhairah, I., Rahayu, J., Asnidar, A., & Andiny, P. (2024). Pengaruh Kepadatan Penduduk, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kriminalitas di Kota Langsa. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(3), 115–131. <https://doi.org/10.59827/jie.v3i3.156>